KEBIJAKAN TURKI MEMBUKA AKSES TERHADAP PENGUNGSI SURIAH PADA TAHUN 2016-2017

SKRIPSI

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Oleh:

ALFIDA FARADINA

17323075

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2024

KEBIJAKAN TURKI MEMBUKA AKSES TERHADAP PENGUNGSI

SURIAH PADA TAHUN 2016-2017

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Oleh:

ALFIDA FARADINA

17323075

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2024

HALAMAN PENGESAHAN

Kebijakan Turki Membuka Akses Terhadap Pengungsi Suriah Pada Tahun 2016-2017

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal, 8 Agustus 2024

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi

Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

	Dewan Penguji	Tanda Tangan
1	Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.	
2	Gustri Eni Putri, S.IP., M.A.	
3	Mohamad Rezky Utama, S.IP., M.Si.	

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Yogyakarta, 9 Agustus 2024



ALFIDA FARADINA

DAFTAR ISI

SKRIPSI **i**

HALAMAN PENGESAHAN Error! Bookmark not defined.

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK Error! Bookmark not defined.

DAFTAR ISI **v**

ABSTRAK **vii**

ABSTRACT **viii**

BAB 1 PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Rumusan Masalah 5

1.3 Tujuan Penelitian 5

1.4 Cakupan penelitian 6

1.5 Tinjauan Pustaka 7

1.6 Kerangka Pemikiran 9

1.7 Argumen Sementara 11

1.8 Metode Penelitian 12

1.8.1 Jenis Penelitian 12

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian 13

1.8.3 Metode Pengumpulan Data 13

1.8.4 Proses Penelitian 14

1.9 Sistematika Pembahasan 15

BAB 2 KEBIJAKAN LUAR NEGERI TURKI **17**

2.1. Turki di Era Pemerintahan Erdogan Sebagai Aktor Nasional 17

2.2 Permasalahan yang Terjadi di Turki 25

2.3 Kebijakan Sementara Turki Terhadap Suriah Sebagai Static Selection 26

BAB 3 KEBIJAKAN TURKI SEBAGAI PILIHAN RASIONAL DALAM MENYIKAPI KRISIS PENGUNGSI SURIAH PADA TAHUN 2016-2017 **32**

3.1. Penetapan Tujuan atau Goals 32

3.2 Pilihan Kebijakan 38

3.3 Konsekuensi 43

3.4 Pengambilan Keputusan atau Choice 46

BAB 4 PENUTUP **49**

2.1. Kesimpulan 49
2.2 Rekomendasi 51
DAFTAR PUSTAKA **52**

ABSTRAK

Integritas wilayah Turki dipandang terancam akibat dampak kemanusiaan dan keamanan akibat konflik Suriah. Dibawah kepresidenan Erdogan, Turki menciptakan pola konsep intensif serta politik yang multifaset untuk mengembangkan kebijakan luar negeri ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi perubahan strategi kebijakan luar negeri Turki dalam krisis Suriah pada tahun 2016-2017. Jenis penelitian ini adalah eksplanatif yang bersifat kualitatif dengan pendekatan Graham T. Allison. Teknik pengumpulan data melalui teknik sekunder, kemudian data dianalisis dengan teknik data sekunder kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Turki menerapkan pendekatan *rational actor* untuk mengambil keputusan luar negeri terkait krisis Suriah. *Pertama*, Turki dalam konflik Suriah menjadi pemain utama di Timur Tengah dalam meningkatkan regionalnya, dan menjadi mediator penyelesaian konflik Suriah. Kemudian, Erdogan juga akan menggunakan kebijakan luar negeri untuk membangun hubungan diplomatik dengan Suriah untuk mempertahankan kepentingan dan integritas nasionalnya. *Kedua,* Erdogan melakukan identifikasi alternatif kebijakan untuk mengambil keputusan perencanaan kebijakan yang rasional dan dapat dijalankan secara efisien, serta sejalan terhadap kebutuhan nasional dan pendapat warganya. *Ketiga,* Turki melakukan evaluasi yang mendalam terhadap setiap alternatif kebijakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang implikasi, risiko, dan manfaat dari setiap pilihan yang tersedia. Di mana, hal ini menyebabkan pemerintah Turki mengadopsi kebijakan yang lebih terinformasi. *Keempat,* pemerintah Turki membuat keputusan kebijakan berdasarkan faktor karakteristik individu yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan, kerangka kelembagaan yang mengatur proses tersebut, pertimbangan ekonomi yang melibatkan kalkulasi biaya dan manfaat, serta strategi geopolitik yang mempertimbangkan posisi Turki dalam hubungan internasional untuk memutuskan kebijakan dengan keakuratan tinggi dalam menyelesaikan krisis Suriah serta memajukan kepentingan nasionalnya.

Kata-Kata kunci: Turki, Kebijakan Luar Negeri, Krisis Suriah,Pemerintah

ABSTRACT

Türkiye's territorial integrity is seen as under threat due to the humanitarian and security impacts of the Syrian conflict. Under Erdogan's presidency, Türkiye created a pattern of intensive concepts and multifaceted politics to develop this foreign policy. This research aims to determine the factors that influenced changes in Turkey's foreign policy strategy in the Syrian crisis in 2016-2017. This type of research is qualitative explanatory with a Graham T. Allison approach. The data collection technique is through secondary techniques, then the data is analyzed using qualitative secondary data techniques. The results of this research show that Türkiye applies a rational actor approach to making foreign decisions regarding the Syrian crisis. First, Turkey in the Syrian conflict has become a major player in the Middle East in improving its region, and has become a mediator in resolving the Syrian conflict. Then, Erdogan will also use foreign policy to build diplomatic relations with Syria to defend its national interests and integrity. Second, Erdogan identified policy alternatives to make rational policy planning decisions that could be implemented efficiently, and in line with national needs and the opinions of its citizens. Third, Turkey conducted an in-depth evaluation of each policy alternative to gain a better understanding of the implications, risks and benefits of each available option. Where, this caused the Turkish government to adopt more informed policies. Fourth, the Turkish government makes policy decisions based on the characteristics of the individuals involved in the decision-making process, the institutional framework that regulates the process, economic considerations involving cost and benefit calculations, and geopolitical strategies that consider Turkey's position in international relations to decide on policies with high accuracy. in resolving the Syrian crisis and advancing its national

Interests Keywords: Türkiye, Foreign Policy, Syrian Crisis, Government.

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Turki, yang terletak di antara dua benua, telah lama menjadi pusat geopolitik penting, terutama di Timur Tengah. Dalam sejarah, Kekaisaran Ottoman mendominasi wilayah ini, namun seiring dengan runtuhnya kekaisaran tersebut, Turki modern kini menghadapi tantangan baru, terutama dalam menangani krisis pengungsi akibat konflik di Suriah (Rahayu 2022, hlm. 35).

Recep Tayyip Erdogan, presiden Turki dan pendiri Partai AKP, telah membawa perubahan besar dalam kebijakan domestik dan luar negeri Turki. Erdogan membuka perbatasan bagi jutaan pengungsi Suriah, meskipun menghadapi tekanan internasional dan tantangan keamanan di wilayah perbatasan, terutama di Idlib, Suriah. Kebijakan ini menunjukkan komitmen Erdogan untuk melindungi kepentingan nasional Turki sambil menangani krisis kemanusiaan yang terus berkembang (Taspinar 2008, hlm. 14; Pattiradjawane 2022, hlm. 78; Mostafa 2022, hlm. 42).

Kebijakan luar negeri Erdogan juga mencerminkan ambisinya untuk menjadikan Turki sebagai aktor global yang signifikan, bukan hanya sebagai jembatan antara Timur dan Barat. Erdogan berusaha memperluas pengaruh Turki di Timur Tengah, sementara tetap menjaga stabilitas internal negara di tengah meningkatnya jumlah pengungsi dan ketegangan dengan negara-

negara tetangga (Taradewi, Wiranata, dan Parameswari 2022, hlm. 91; Taghian 2011, hlm. 254).

Perjanjian yang dibuat antara UE dan Turki, di tahun 2016 menjadi waktu di mana keduanya menjalankan kesepakatan bahwa untuk melakukan pengurangan migrasi ke Eropa dengan mendapakan kompensasi bebas visa bagi setiap warganya serta mendapatkan uang sebesar 6 miliar euro. Sejumlah uang 6,6 miliar dolar AS yang menjadi uang perjanjian UE akan diberikan jika negara Turki mempunyai kekuatan dalam melakukan control atas jumlah warga yang akan mengungsi untuk berpindah ke wilayah Eropa. Sementara itu, Presiden Turki yakni Erdogan menyatakan bahwa UE ingkar janji dengan tidak memberikan uang perjanjian secara penuh, sehingga membuat Erdogan tidak segan menyerukan kepada seluruh pihak untuk bebas melakukan perjalanan atau berpindah ke wilayah Eropa. Di mana, Erdogan sebelumnya mendapat ancaman dari AS dan Uni Eropa karena mengarahkan invasi militer Turki ke Suriah utara selama peperangan yang ada di Suriah. AS dan UE menegaskan bahwa kondisi yang terdapat di wilayah di Suriah terus memburuk atau mengalami ancaman setelah militer Turki menguasai pasukan Kurdi di bulan Oktober. Meskipun begitu, Turki membabi buta dengan keputusannya. Di sisi lain, berjalannya waktu ini membuat Turki mulai memberikan kritiknya dalam menerima hadiah dari Brussel. Meskipun Rusia dan Turki berada di pihak yang berbeda dalam konflik ini, mereka mempunyai kesepakatan bersama untuk segera mengakhiri konflik besar di Suriah (CNN Indonesia 2022).

Keputusan terakhir yang diberikan Erdogan adalah dengan membebaskan akses pihak yang akan berpindah dari Turki ke wilayah Eropa, dan Yunani ini menjadi negara Eropa yang letaknya terdekat dari negara Turki. Diketahui, saat ini total angka sudah mencapai ribuan pengungsi yang menempati wilayah Yunani ini. Akibat dari peperangan saudara di Suriah yang berlangsung dengan waktu 8 tahun mengakibatkan besarnya pengungsinya, yaitu sebanyak 3,6 juta. Di mana, pengungsi Suriah tersebut berhasil ditampung oleh Turki, namun pengsungsi ini diketahui tidak hanya dari Suriah melainkan dari wilayah konflik yang lain, seperti Afrika dan Timur Tengah. Harapan pemerintah Turki terhadap pengungsi terdampak dari konflik Suriah ini melakukan perjalanan untuk kembali ke wilayah masing-masing dengan cepat ketika telah menyelesaikan operasi militer di kota Afrin, yakni Ranting Zaitun.Tujuan ini dikemukakan oleh Emine Erdogan, istri presiden saat melangsungkan konferensi di kota Istanbul, yang berisikan penyediaan sarana reunifikasi bagi satu juta orang yang tidak memiliki tempat tinggal, kemudian Presiden Recep Tayyip Erdogan menyusun rencana tersebut dengan bantuan melalui pembentukan organisasi dengan pendanaan asing (Oktarianisa 2022).

Kondisi tersebut mendorong negara Turki untuk menjalankan aktivitas operasi militer yang lokasi tepatnya berada di Suriah Timur Laut. Turki melakukan operasi ini guna meluluhlantakkan kawanan dari Unit Perlindungan Rakyat Kurdi (YPG) dan Partai Persatuan Demokratik Suriah (PYD). Kawanan YPG ini dipandang sebagai cabang dari Partai Pekerja Kurdistan (PKK). Di mana PKK ini menjadi kawanan dengan senjata Kurdi

dan mereka terlibat dalam perlawanan dengan kurun waktu 30 tahun yang berada di Turki Tenggara. Teroris menjadi salah satu bentuk julukan yang diberikan Turki kepada kawanan PKK dan YPG. Operasi militer tersebut mendapat kecaman dari beberapa negara di wilayah Arab, terutama Arab Saudi, Mesir, dan Uni Emirat Arab (UEA). Negara-negara tersebut berpendapat bahwa tindakan militer Turki tidak hanya membahayakan Suriah tetapi juga berpengaruh pada kondisi yang membahayakan terkait stabilitas regional. Mesir menjadi negara yang berani melakukan pengajuan terhadap Liga Arab untuk mengadakan konferensi krusial yang berkaitan atas adanya aktivitas militer Turki yang bertempat di kawasan Suriah (Dikarma 2022).

Peperangan dan krisis yang terjadi di Suriah tentunya melahirkan dinamika politik di negara-negara yang menjadi perbatasan Suriah, termasuk dalam hal ini Turki. Persoalan internal (dalam negeri) dan eksternal (luar negeri) politik di Turki juga ikut memengaruhi berbagai kebijakan Turki terhadap peperangan dan krisis di Suriah yang demikian kompleks. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis strategi-strategi yang membentuk pendekatan kebijakan luar negeri Turki selama krisis Suriah pada tahun 2016-2017, serta berbagai factor yang memberikan pengaruh dari perubahan kebijakan luar negeri Turki ini.

Pengungsi tetap menjadi isu global yang signifikan, dengan perlindungan internasional yang didasarkan pada Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Turki meratifikasi konvensi ini pada 24 Agustus 1951. Pasal 14 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 mengakui hak untuk mencari suaka dari persekusi, dan Konvensi 1951, yang berlaku sejak 22 April 1954,

memberikan landasan utama bagi perlindungan pengungsi. Protokol 1967 memperluas cakupan Konvensi 1951 dari wilayah Eropa menjadi universal.

Konvensi 1951 mengkonsolidasikan instrumen-instrumen terkait pengungsi dan memberikan perlindungan berdasarkan prinsip-prinsip nondiskriminasi, larangan hukuman, dan larangan pengusiran atau pengembalian (non-refoulement). Pasal 1 Konvensi ini menetapkan standar minimum bagi perlakuan pengungsi, termasuk hak dasar seperti hak hidup, bebas dari penyiksaan, perbudakan, serta hak kebebasan berpikir. Konvensi juga mengatur status hukum pengungsi, termasuk hak untuk bekerja, kesejahteraan, dan akses terhadap pengadilan, pendidikan, dan jaminan sosial. Selain itu, konvensi ini juga menetapkan kewajiban negara-negara peserta terhadap pengungsi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan yang dikemukakan pada latar belakang tersebut, dapat dikemukakan rumusan masalah adalah mengapa proses pengambilan kebijakan oleh negara Turki menggunakan pendekatan rational aktor dalam menangani krisis yang dialam oleh negara Suriah pada tahun 2016-2017?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi perubahan strategi kebijakan luar negeri Turki dalam krisis Suriah pada tahun 2016-2017

1.4 Cakupan penelitian

Berdasarkan acuan peneliti atas kajian yang ada didalam penelitian ini, peneliti menggunakan fokus penelitian untuk melihat bagaimana strategi kebijakan luar negeri Turki dalam krisis Suriah pada tahun 2016-2017 dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan strateginya. Untuk mempermudah dalam melihat bagaimana perubahan kebijakan ini, peneliti juga memilih untuk menganalisis Turki mengubah kebijakannya dalam krisis Suriah dalam rentang 2016-2017. Pemilihan waktu 1 tahun diharapkan mampu untuk menjadi fokus penulis dalam menganalisis perubahan kebijakan ini. Berdasarkan apa yang telah dipaparkan pada bagian rumusan masalah, penulis berfokus pada tujuan dengan hasil akhir menjawab rumusan serta tujuan tujuan penelitian.

Selain itu, pemilihan tahun 2016-2017 sebagai rentang waktu penelitian ini didasarkan pada beberapa pertimbangan penting. Pertama, periode tersebut merupakan titik balik penting dalam konflik Suriah, di mana berbagai perubahan signifikan terjadi dalam dinamika politik dan militer di wilayah tersebut. Kedua, dalam menanggapi krisis Suriah di kurun waktu tersebut, Turki melihat perubahan strategis yang signifikan pada masa ini yang mungkin memberikan wawasan penting mengenai bagaimana faktor internal dan eksternal mempengaruhi kebijakan luar negeri negaranya. Sebab itu, pemilihan tahun 2016-2017 sebagai periode penelitian memberikan kerangka waktu yang jelas dan terbatas untuk mengeksplorasi perubahan strategi kebijakan luar negeri Turki terkait dengan krisis Suriah.

1.5 Tinjauan Pustaka

Hasil penelitian oleh Titik Sumaryati yang berjudul "Kebijakan Pemerintahan Turki Terhadap Pengungsi Dari Suriah" memaparkan mengenai alasan terjadinya gejolak di Suriah dan respons cepat Turki sebagai negara tetangga. Pendekatan penelitian ini mengarah kepada penggunaan tinjauan pustaka yang dilakukan dengan menyusun dan mengkaji artikel jurnal dan surat kabar terkait mengenai permasalahan di kawasan Suriah. Temuan analisis menggambarkan bahwa kebijakan Türkiye mengenai pengungsi dari Suriah karena pengaruh dari 2 faktor utama, yaitu politik dan ideologi (Sumaryati 2022).

Kemudian, hasil penelitian oleh Ismet Putra dengan judul "Pengaruh Konflik Domestik Suriah Terhadap Kebijakan Luar Negeri Turki Ke Suriah (2011-2013)" memaparkan mengenai langkah-langkah yang diambil pemerintah Turki untuk menyelesaikan masalah ini antara tahun 2011 dan 2013 dan bagaimana perang internal Suriah mempengaruhi kepentingan nasional Turki. Metodologinya adalah tinjauan literatur, yang meliputi pengumpulan dan analisis data dari banyak sumber media yang berhubungan dengan masalah ini (Putra 2022).

Hasil penelitian oleh Amalia Zatalini Kusuma Putri dengan judul "Kebijakan Turki dalam Menampung Pengungsi Korban Perang Saudara Suriah Tahun 2011-2013" memaparkan mengenai prinsip-prinsip yang mendasari strategi, serta kepastian tujuan Turki melalui kebijakannya untuk menjadi penampung yang berasal dari kawasan Suriah pada tahun 2011 hingga 2013. Penelitian jenis ini menggunakan teknik studi kasus untuk memberikan penjelasan. Pendekatan wawancara digunakan dalam penelitian ini untuk

mengumpulkan data dengan wujudnya yang cenderung kepada sudut pandang individu yang nantinya berfungsi untuk target penilaian ketika menjalankan aktivitas peneltiian. Di sisi lain, informasi dikumpulkan oleh para sarjana dari media buku, jurnal, laporan, peraturan, dan penelitian online (Putri 2022).

Dogan Ertugrul dengan artikelnya yang berjudul *A Test for Turkey's Foreign Policy: The Syria Crisis* dalam *TESEV Foreign Policy Programme* (2012), berbicara tentang usaha yang dilakukan pemerintahan negara Turki dalam memisahkan adanya peperangan yang ada di wilayah Suriah. Selain itu, menjabarkan penjelasan mengenai dampak dari kondisi konflik di Suriah terhadap kebijakan luar negeri Turki dan hubungan Turki dengan negara-negara seperti Rusia dan Iran yang pernah berhubungan dengan Suriah dan Turki. Tetapi, kelemahan artikel ini tidak menjabarkan dengan jelas mengenai dampak dari adanya permasalahan konflik yang ada di Suriah dan kepentingan nasional Turki (Ertugrul 2012).

Selanjutnya, hasil penelitian oleh Altunisik dan Tur dari *Middle East Technical University* (2006), dalam artikelnya *From Distant Neighbour to Partners? Changing Syrian-Turkish Relation,* memaparkan penjelasan perkembangan hubungan antara Suriah dan Turki sejak awal berdirinya masing-masing. Serta membahas perjuangan lama untuk keluar dari konflik yang melibatkan kedua negara, usaha dalam mempertahankan keselamatan pribadi dalam kerangka konflik yang terjadi antara Suriah dan Turki, dan menerapkan banyak pendekatan yang diambil oleh masing-masing pihak guna mengakhiri perseteruan. Studi ini mengambil focus pada upaya untuk memperkuat hubungan antar 2 negara, khususnya di bawah pemerintahan

AKP. Kemudian, penelitian ini juga mengambil focus pada rancangan strategi untuk mengakhiri masalah sebelum tahun 1998 (Altunisik dan Tur 2022).

Hasil penelitian oleh Arya Fernandes yang berjudul *Keberhasilan Adalet ve Kalkinma Partisi (AKP) dalam Politik* dari jurusan Pemikiran Politik Islam, memaparkan penjelasan yang mengarah kepada banyaknya kebijakan Turki di dalam dan luar negeri yang dipengaruhi oleh kebangkitan dan kejayaan AKP terkait politik di negara Turki. Kajian yang diberikan penelitian ini juga menggambarkan elemen-elemen yang berkontribusi pada kejayaan partai PM Erdogan yang berada pada sejumlah pemilu, serta kekhawatiran negara Turki di masa sekarang, termasuk kecemasan terkait ikatannya dengan UE dan AS, yang dihadapi Turki saat ini, seperti hubungannya dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa, serta perubahan yang dilakukan oleh pemerintah Turki sebagai tanggapan terhadap banyak inisiatif terkait sekularisme pemerintahan terdahulu. Di sisi lain, fokusnya juga mengarah pada dinamika politik internal, keberhasilan AKP tahun 2002 saat berlangsungnya aktivitas pemilu Turki, dan perubahan politik yang terjadi setelah partai tersebut berkuasa. Di sisi lain, pembahasan lainnya juga mengarah kepada hal-hal yang berkaitan dengan interaksi Turki dengan AS dan UE (Fernandes 2022).

1.6 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kerangka permasalahan di atas, kesimpulan yang ditetapkan peneliti adalah kebijakan luar negeri Turki pada masa krisis Suriah pada tahun 2016–2017 banyak mengarah kepada teori Allison, yaitu Pengambilan Keputusan Luar Negeri. Graham T. Allison mengemukakan empat fase kognitif yang dapat dipandang dan diterapkan menjadi model

pembuatan kebijakan terkait upaya-upaya yang berhubungan dengan aktivitas suatu negara sebagai penilaian yang masuk akal, yaitu: 1) actor nasional; dalam hal ini pembuat kebijakan merupakan peran dari sebuah pemerintah atau negara sebagai pembuat keputusan dalam permasalahan yang sedang terjadi dalam sebuah negara, pemerintah sebagai pemilih tindakan yang akan memaksimalkan tujuan tujuan strategis tersebut 2) Permasalahan suatu negara; merupakan tahapan yang akan di tindak lanjuti oleh negara sebagai pembuat kebijakan dalam menangani suatu permasalah yang terjadi. Keputusan suatu negara untuk mengambil tindakan dipengaruhi oleh kesulitan yang dihadapinya, serta tantangan dan kemungkinan yang dihadapinya secara internasional. 3) static selection; merupakan sebuah tahapan yang berisi tindakan sementara dari keputusan awal yang masih memungkinkan untuk berubah dari sebuah permasalahan yang terjadi dan sebuah solusi sementara meskipun pada akhirnya tindakan yang dipilih tidak sesuai dengan kondisi dan tidak berubah seiring berjalannya waktu 4) pengambilan keputusan atau Choice yang mencakup :

1) penetapan tujuan atau goals; awal dari sebuah keputusan permasalahan merupakan tujuan untuk mencapai sesuatu yang telah di rencanakan dari menganalisa suatu permasalahan yang sedang terjadi di sebuah negara, tujuan dibentuk dengan cara mengumpulkan data dan informasi kemudian menimbang semua resiko kemudian untuk selanjutnya memilih langkah dan implementasi yang selanjutnya akan dilakukan oleh sebuah negara.

2) identifikasi alternatif kebijakan yang tersedia; pembuat kebijakan atau sebuah negara harus memilih seluruh kebijakan yang alternatif yang telah tersedia pada suatu waktu tertentu sehingga selanjutnya untuk mengambil kebijakan alternatifnya ada beberapa rangkaian keputusan yang harus diambil di dalam mengeluarkan kebijakan.

3) evaluasi konsekuensi atau assessment berdasarkan perhitungan untung-rugi dari setiap opsi kebijakan yang tersedia; actor rasional harus mempunyai perbandingan dimana hal tersebut sudah diketahui konsekuensi permasalahan atas pemilihan kebijakan yang akan diambil serta hambatan apa saja yang akan terjadi

4) pengambilan keputusan atau Choice; pilihan rasional ini terdiri dari keputusan untuk memilih kebijakan alternatif dan sudah diketahui konsekuensinya yang merupakan kebijakan yang paling banyak dipilih dalam fungsi hasil dari pembuatan keputusan. (Allison, 1969)

1.7 Argumen Sementara

Argumen sementara terkait kebijakan luar negeri Turki pada krisis Suriah 2016-2017 mencakup beberapa faktor. Pertama, aktor nasional: Turki menerapkan kebijakan "open door policy" untuk membangun zona aman bagi pengungsi Suriah di perbatasan yang bebas dari ancaman PKK, YPG, dan ISIS, serta menjaga stabilitas dalam negeri.

Kedua, permasalahan negara: Turki membuka jalur bagi pengungsi menuju Eropa, dengan Yunani sebagai negara tujuan utama. Selain pengungsi Suriah, migran dari wilayah konflik di Timur Tengah dan Afrika juga melintasi kawasan ini.

Ketiga, seleksi statis: Kebijakan sementara diterapkan melalui operasi militer seperti Operation Peace Spring (2019), Operation Olive Branch (2018), dan Operation Euphrates Shield (2016), untuk membangun zona aman dan menjaga kedaulatan serta keamanan domestik Turki.

Keempat, tindakan: Turki berambisi menjadi negara penting di Timur Tengah dan berharap Eropa memenuhi komitmen finansialnya. Pilihan yang diambil Turki, termasuk ancaman untuk membuka jalur pengungsi ke Eropa, ditahan karena konflik di Suriah, sementara Rusia dan Turki berupaya mengakhiri perang. Konsekuensi dari situasi ini adalah meningkatnya jumlah pengungsi yang masuk ke Turki serta potensi berkurangnya dukungan dari partai politik AKP. Akhirnya, pilihan lain adalah membuka perbatasan bagi pengungsi Suriah dengan harapan mereka akan kembali ke wilayah asal setelah operasi militer di Afrin, yakni Ranting Zaitun.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah eksplanatif. Penelitian ini berupaya untuk memberikan penjelasan guna melakukan penganlisaan, mempredisiki, dan mendefinisikan faktor-faktor yang sudah ada secara terorganisir. Penelitian ini akan memaparkan temuan yang komprehensif dan mendalam. Sederhananya, penelitian eksplanatori menjadi jenis pendekatan dalam pengumpulan informasi, pengembangan, penganalisaan, dan penafsiran guna memahami suatu perubahan strategi kebijakan luar negeri Turki terhadap konflik Suriah antara tahun 2016 dan 2017.

Penelitian ini bersifat kualitatif karena jenis data yang digunakan. Menurut (Silalahi 2012, 39), penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan tidak bergantung pada ketepatan statistic. Penelitian ini bertujuan unruk menghasilkan uraian yang terstruktur, konkret, karaktersitik, dan keterkaitan fenomena atau permasalahan yang akan diteliti dengan teknik-teknik dalam mengumpulkan data (Nazir 1988, 63). Jadi, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berbentuk eksplanatif.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Peneliti memilih subjek Negara Turki berdasarkan krisis yang terjadi di negara Suriah. Sementara itu, objek penelitian ini adalah pengungsi.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Teknik yang dapat diterapkan untuk mengumpulkan data peneliti terdiri dari 4 kategori, antara lain observasi, wawancara, dokumen, dan gambaran visual yang dirangkum dalam penelitian kualitatif, dan setiap kategori teknik tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangan (Creswell 1994, 149). Peneliti hanya menggunakan satu teknik dari empat kategori, yaitu menerapkan teknik dokumen.

Teknik pengumpulan data yang diterapkan peneliti dalam penelitian, yaitu melalui teknik sekunder. Sehingga, peneliti akan mendapatkan informasi melalui studi pustaka yang ditemukan dari media dan sumber pustaka atau literatur sebagai rujukan penelitian. Untuk literatur ini, peneliti juga mendapatkan data melalui pengumpulan data yang berkaitan dengan subjek atau isu yang diselidiki untuk studi literatur ini. Sumber informasi lain yang dimanfaatkan peneliti mengacu pada buku, jurnal/artikel, tesis, disertasi, *online newspaper*, *website* resmi pemerintah, lembaga luar negeri yang terkait, dan sumber lain yang sesuai atau sejalan dengan

focus penelitian ini. Setelah memperoleh data atau informasi, peneliti menyeleksi atau memilih data yang sesuai dengan topik penelitian

1.8.4 Proses Penelitian

Data penelitian yang ditemukan diperoleh berdasarkan studi literatur yang mana hal tersebut menunjukkan bahwa analisis penelitian ini menggunakan data kualitatif. Sementara itu, data sekunder kualitatif diterapkan sebagai teknik analisis dengan wujud deskripsi berbasis kalimat.

Peneliti melakukan olah data melalui penganalisaan dengan cara berkelanjutan. Jika, data telah didapatkan maka selanjutnya peneliti mengambil langkah dengan melakukan beberapa prosedur verifikasi guna menilai dan memastikan kebenaran data atau informasi yang ditemukan. Kemudian, peneliti mengkategorikan setiap informasi berdasarkan kelompok yang ditetapkan sebelumnya.

Hal tersebut bertujuan untuk mempertajam hasil temuan peneliti guna mempermudah pembaca untuk mengerti dan memahami. Hal ini untuk memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan dapat diandalkan dan dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Serangkaian teknik tersebut berfungsi untuk memberikan kepastian bahwa data yang ditemukan dapat diandalkan serta dapat diimplementasikan dalam penelitian ini untuk memberikan jawaban atas rumusan masalah yang ditetapkan peneliti sebelum melakukan analisis olah data.

Peneliti skripsi, disini akan melakukan analisa data terkait strategi Turki dalam mengubah kebijakan luar negerinya dalam menanggapi konflik Suriah dari sudut pandang ini. Selanjutnya, dalam bab pembahasan, peneliti mempunyai rencana untuk menjabarkan menyeluruh mengenai perubahan non-materiil,

meliputi gagasan, konsep, hubungan, dan persetujuan perjanjian masing-masing pihak. Permasalahan tersebut akan mempengaruhi strategi kebijakan luar negeri Turki sepanjang konflik Suriah yang berlangsung di tahun 2016 hingga 2017.

1.9 Sistematika Pembahasan

Penelitian yang dilakukan akan mengkaji 4 bab. Bab yang pertama adalah pendahuluan, dan yang terakhir adalah penutup. Unsur-unsur yang menjadi pedoman penyusunan skripsi ini dibahas pada bab pendahuluan. Bab pendahuluan dibuka dengan latar belakang permasalahan, kemudian diikuti dengan rumusan, tujuan, ruang lingkup, signifikansi, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, argumentasi sementara, metodologi, dan sistematika pembahasan, di mana semuanya dirangkum dalam bab awal.

Bab yang kedua mengemukaan mengenai Turki dalam Krisis Suriah. Pada bab ini dikemukakan tentang Turki yang meliputi sejarah, kondisi sosial, ekonomi, geografis, dan politiknya. Dikemukakan pula kajian tentang krisis Suriah yang meliputi pihak-pihak yang terkait dalam krisis, faktor-faktor penyebabnya, dan implikasinya.

Bab ketiga memberikan penjelasan mengenai banyak factor yang mempengaruhi strategi kebijakan luar negeri Turki selama konflik Suriah tahun 2016 dan 2017. Bab ini mengkaji elemen-elemen yang mempengaruhi strategi kebijakan luar negeri Turki selama konflik Suriah, termasuk aktivitas perpolitikan nasional, pengambil keputusan, serta kemampuan militer dan ekonomi.

Pada bab keempat merupakan penutup yang didalamnya dikemukakan dengan wujud kesimpulan singkat yang mampu menjawab dari rumusan masalah.

Selain itu, terdapat berbagai gagasan berupa saran yang masih berhubungan dengan studi penelitian

BAB 2
KEBIJAKAN LUAR NEGERI TURKI

2.1. Turki di Era Pemerintahan Erdogan Sebagai Aktor Nasional

Pengertian Aktor nasional dalam hal ini adalah para pembuat kebijakan merupakan peran dari sebuah pemerintah atau negara sebagai pembuat keputusan dalam permasalahan yang sedang terjadi dalam sebuah negara, pemerintah sebagai pemilih tindakan yang akan memaksimalkan tujuan tujuan strategis tersebut dalam hal ini Turki sebagai actor nasional mengaplikasikan asas kebijakan luar negeri *zero problem with neighbors* yang artinya berupaya menghindari bermasalah dengan negara-negara di sekitarnya. (Allison, 32-33)

Meskipun demikian, Turki mulai menunjukkan perubahan pada prinsip kebijakan luar negerinya setelah muncul dan berkembangnya gelombang *Arab Spring* di regional Timur Tengah dan adanya sikap Rezim Assad di Suriah memperlihatkan sikap kerasnya pada para demonstran yang melakukan penuntutan terhadap pemerintahan yang demokratis (Wei 2019).

Perubahan Turki terkait dengan prinsip luar negerinya ini mengarah pada prinsip kebijakan luar negeri yang lebih aktif dan memiliki multidimensi (*multidimensional foreign policy*) serta berupaya menyeimbangkan antara keamanan dan kebebasan (*balance between freedom and security*). Sikap aktif ini ditunjukkan Turki dengan tidak diam melihat perkembangan permasalahan di Suriah (Wei 2019). Pada aspek multidimensi, Turki menunjukkan sikap yang tidak hanya fokus pada kebijakan luar negerinya Eropa, tetapi juga Timur Tengah. Sementara itu, keseimbangan antara keamanan dan kebebasan

dimaksudkan sebagai tindakan yang memberikan jaminan keamanan kepada setiap individu untuk terbebas dari pelanggaran HAM dan memberikan jaminan terhadap kebebasan umum yang kemudian salah satunya diwujudkan dalam bentuk pemerintahan yang lebih demokratis. (Sozen, 2010)

Pada mulanya Turki yakin dapat melakukan menjembatani konflik terjadi di Suriah dengan melakukan pendekatan kepada Basir Assad untuk mendorong terbentuknya pemerintahan yang lebih demokratis yang salah satunya mengusulkan untuk melakukan pembagian kekuasaan dengan pihak oposisi (Wei 2019). Tetapi melihat realitas bahwa pemerintahan Basir Assad menolak gagasan Turki, membuat Turki kemudian merubah kebijakan luar negerinya dengan mendorong dan mendukung pihak oposisi untuk menyukseskan gelombang *Arab Spring* dengan berupaya ikut menggulingkan pemerintahan Assad yang dipandang sebagai pihak yang otoriter (Wei, 2019).

Turki kemudian menunjukkan dukungannya pada pendirian *Free Syrian Army* (FSA) pada tanggal 15 September 2011 di Istanbul. Organisasi ini adalah sayap militer dari organisasi oposisi di Suriah (*Syrian National Council*). Pemberian dukungan ini direalisasikan dalam bentuk melakukan pelatihan dan memberikan persenjataan serta mendistribusikan logistik untuk kebutuhan militer (Wei 2019).

Turki pada mulanya memiliki kebijakan luar negeri yang sangat idealis. Kebijakannya didasari oleh paham Neo-Ottomanisme (Kosebalaban, 2020). Paham tersebut mengacu pada bentuk perspektif yang diberikan oleh Partai Keadilan dan Pembangunan atau Rezim Adalet ve Kalkinma Partis, dan berasal dari romantisme Kerajaan Ottoman yang pada masanya mampu menjadi

pemimpin dunia Islam serta kekuatan global dan kekhasan posisi Turki yang secara geografis sangat strategis (Saracoglu dan Demirkol 2015).

Ideologi Neo-Ottomanisme yang diadopsi pemerintahan AKP ini pada dasarnya adalah kebalikan dari ideologi Kemalisme yang bersumber dari asas-asas yang dikemukakan oleh Mustafa Kemal Ataturk ketika membangun Turki modern (Antonopoulos, 2017). Ideologi ini mengharapkan negara Turki menjadi bagian seutuhnya dari Barat dan menjauhkan diri dari unsur-unsur yang berhubungan dengan Kerajanaan Ottoman yang salah satunya adalah menghindari dan mengurangi hubungan dengan Timur Tengah (Saracoglu dan Demirkol 2015; Uzer 2020).

Ideologi Neo-Ottomanisme yang masih sangat komprehensif ini kemudian diuraikan dan diimplementasikan secara riil oleh pemerintahan AKP melalui doktrin *Strategic Depth* yang dikemukakan oleh Ahmed Davutoglu sebagai Perdana Menteri Turki pada waktu itu prinsip-prinsip kebijakan luar negeri Turki (Sozen 2010), yaitu:

1. *Self Perception*, sebagai suatu konsep yang mendeskripsikan tentang bagaimana seharusnya Turki mampu menempatkan dirinya di tengah-tengah pergaulan dunia yang harus berlandaskan pada sikap percaya diri dalam persaingan global, membuka dirinya, tampil dalam forum-forum dunia yang berdiri di atas stabilitas dan kekuatan demokrasi dan ekonomi Turki.
2. *Strategic Depth*, Sebagai suatu gagasan yang seharusnya Turki berperan dan berkedudukan penting atas adanya transformasi dunia, serta sistem

internasional. Hal ini mengacu pada aspek sejarah dan geografis Turki yang secara geopolitik, geokultural, dan geoekomoni yang sangat strategis.

3. *Proactive Diplomacy*, merupakan diplomasi yang bertujuan agar Turki mampu memimpin dalam memberikan solusi pada setiap konflik yang ada di percaturan dunia sehingga mempunyai kemampuan untuk berhubungan secara damai antar beberapa negara lainnya. Diplomasi ini dapat dirasakan dari harapan negara Turki untuk berhasil memisahkan krisis antar negara, seperti Israel-Arab, Iran-Barat, Suriah-Israel, serta Serbia-Bosnia.
4. *Rhythmic Diplomacy*, adalah bagian dari bentuk prinsip teknis panduan kebijakan luar negeri Turki, yaitu mengambil sikap yang cenderung lebih proaktif didalam urusan dunia. Berdasarkan gagasan ini, Turki berpeluang untuk melakukan diplomasi dalam kerangka tatanan internasional yang sifanya dapat berubah.
5. *Multi-Dimensional/Multi-Layered Foreign Policy*, Turki adalah negara yang penting karena gagasan ini. Kebijakan luar negeri menjadi salah satu sudut pandang yang mampu mengatasi banyak tantangan dengan menggunakan konsep multifaset serupa, serta didasarkan terhadap interaksi positif dengan berbagai entitas luar negeri.
6. *Active Involvement on the Global Scale*, Gagasan ini merupakan pendekatan luas terhadap kebijakan luar negeri yang dapat menginspirasi Turki untuk berpartisipasi proaktif dalam perjanjian internasional. Turki berupaya melakukan redefinisi peran dalam tatanan internasional.
7. *Zero problems with neighbors*, gagasan ini menjadi metode yang dikontruksi berdasarkan ide yang seharunya negara Turki mempunyai

kemampuan kuat dalam membangun hubungan yang baik dengan seluruh negara-negara disekitarnya. Ini sekaligus menafikan asumsi mendasar di publik bahwa Turki memiliki banyak musuh. Kebijakan luar negeri ini memiliki tujuan utama untuk membangun stabilitas pemerintah dalam negeri Turki dengan berlandas pada 6 pilar, yaitu: 1) Memiliki keamanan yang sama bagi semua, 2) Ekonomi yang terintegrasi, 3) Menghargai keberadaan pada sistem sosial dan budaya yang berbeda, 4) Bekerjasama dalam bidang politik secara komprehensif dan tingkat tinggi, 5) Memiliki kesadaran wilayah yang tinggi, dan 6) Memahami kaitan antara keamanan, stabilitas dengan pembangunan.

8. *Self-Confident Foreign Policy,* dalam gagasan ini, Turki harus senantiasa mengingat asal usul sejarahnya sebagai ilmu pengetahuan dunia serta senter dari peradaban Islam seluru dunia. Sehingga, salah satu negara yang berpengaruh signifikan terhadap tatanan dunia adalah Turki. Setelah itu, pendekatan ini mempengaruhi modifikasi kebijakan luar negeri Turki dalam tiga cara berbeda., yaitu: 1) Mengembangkan gagasan dan ide fundamental yang berimplikasi pada peningkatan rasa nyaman negara-negara tetangga dalam menjalin kerjasama dengan Turki. Berdasarkan titik ini, negara Turki mengklaim bahwa dengan secara aktif menghindari dan menyelesaikan masalah ini dengan menunjukkan sikap yang konstruktif., 2) Mengganti kebijakan luar negeri yang berdampak pada peningkatan kekuatan yang memenuhi harapan publik Turki, dan 3) Mengembangkan standar dan konsistensi perekonomian negara, di mana hal tersebut akan

memberikan Turki jaminan lebih dalam melaksanakan rencananya terkait kebijakan luar negeri.

9. *Coherent Relations with Global Power*, jika didasarkan pada sistem internasional, gagasan ini berfungsi dalam pembangunan interaksi positif yang adil dan damai dengan negara-negara besar, salah satunya adalah Amerika Serikat. Penerapan gagasan ini juga bertujuan untuk menjauhi adanya konfrontasi internasional dan memandang penyelarasan kebijakan luar negeri dengan taktik kooperatif sebagai alternatif yang moderat.
10. *Model Country*, penjelasan pertama konsep ini diperkenalkan pada semester kedua tahun 2000-an. Asumsi dasar konsep ini adalah bahwa Turki harus menjunjung sekularisme dan demokrasi sekaligus menjadi penghubung bagi banyak negara Timur Tengah lainnya, khususnya negara-negara dengan populasi Muslim yang cukup besar. Gagasan seperti ini sering dipandang sebagai agenda hendak menjadikan kawasan Timur Tengah sebagai pusat penyebaran Islamyang moderat.
11. *Middle Easternisation*, prinsip ini dipergunakan untuk mendeskripsikan terjadinya peningkatan minat rezim AKP terhadap Timur Tengah yang direalisasikan dengan normalisasi hubungan dengan negara-negara Timur Tengah serta menjadi dasar bagi ambisi Turki menjadi pusat dan negara paling berpengaruh di Timur Tengah tanpa menafikan hubungan dengan Amerika, Rusia dan Uni Eropa.
12. *Soft Power*, Gagasan ini menjadi konsep Turki dalam membangun asas atau dasar nasional dan internasional melalui keanggotaannya dengan UE, mengembangkan ketahanan D-8, dan keterlibatan dengan lembaga-

lembaga negara berkembang yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

13. *Security for All*, prinsip ini digunakan Turki sebagai upaya dalam membangun keamanan dalam negeri dan negara-negara disekitarnya. Türkiye percaya bahwa setiap warga Turki harus mempunyai hak dasar atas keamanan, di mana hal tersebut menjadi bentuk upaya dalam membangun kesetaraan antara keamanan dan demokrasi dalam negeri.

Banyaknya gagasan serta konsep ini diterapkan guna sebagai acuan negara Turki untuk menerapkan rencananya terkait kebijakan luar negeri. Berbagai gagasan yang diungkapkan dari Ahmet Davutoglu menyatakan bahwa kebijakan luar negeri Turki dirancang sebanding atau selaras, sehingga memungkinkan Turki terlibat dalam urusan internasional secara komprehensif dan terorganisir.

Salah satu produk utama kerja sama antara Turki dan Uni Eropa (UE) terkait dengan krisis pengungsi Suriah adalah kesepakatan yang dikenal sebagai "EU-Turkey Statement" atau "EU-Turkey Deal," yang dicapai pada bulan Maret 2016. Kesepakatan ini dirancang untuk mengatasi krisis migrasi yang terjadi pada saat itu, di mana Turki setuju untuk menahan para pengungsi dan migran di wilayahnya dan mencegah mereka menyeberang ke Eropa, terutama melalui rute Laut Aegea menuju Yunani. Sebagai gantinya, Uni Eropa berkomitmen untuk memberikan bantuan keuangan sebesar 6 miliar euro kepada Turki untuk mendukung pengelolaan pengungsi, mempercepat proses liberalisasi visa bagi warga Turki, dan melanjutkan pembicaraan tentang aksesi Turki ke Uni Eropa.

Pemerintah Turki, khususnya di bawah kepemimpinan Presiden Recep Tayyip Erdoğan, memainkan peran kunci sebagai pembuat kebijakan nasional yang memutuskan untuk berkolaborasi dengan Uni Eropa dalam menangani krisis pengungsi. Kebijakan ini mencerminkan prinsip "zero problems with neighbors," yang pada awalnya mendorong Turki untuk menjaga hubungan baik dengan negara-negara tetangga, termasuk Suriah. Namun, situasi yang memburuk akibat krisis Suriah memaksa Turki untuk menyesuaikan kebijakan luar negerinya dengan lebih proaktif dan multidimensional, berfokus pada keamanan serta kebebasan.

Uni Eropa, melalui lembaga-lembaganya seperti Komisi Eropa dan Dewan Eropa, menjadi mitra utama Turki dalam kesepakatan ini. Uni Eropa berperan dalam menyusun dan menyetujui kesepakatan tersebut, menyediakan dana, serta memberikan janji-janji terkait liberalisasi visa dan pembicaraan aksesi yang lebih lanjut. Negara-negara anggota Uni Eropa, terutama yang terkena dampak langsung dari krisis pengungsi seperti Yunani dan Jerman, juga merupakan aktor penting dalam kerja sama ini. Mereka mendorong Uni Eropa untuk mencari solusi dan mendukung implementasi kesepakatan dengan Turki. Selain itu, organisasi internasional seperti UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) dan berbagai LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) juga terlibat dalam mengawasi dan membantu implementasi kesepakatan ini, memastikan bahwa hak-hak pengungsi dihormati dan bantuan kemanusiaan tersalurkan dengan baik.

Kerja sama ini menunjukkan bagaimana Turki, sebagai aktor nasional, mengambil tindakan strategis yang mencerminkan perubahan dalam kebijakan

luar negerinya, yang sebelumnya bersifat lebih idealis dan Neo-Ottomanisme, menjadi lebih pragmatis dan berorientasi pada hasil dalam menghadapi tantangan regional dan internasional.

2.2 Permasalahan yang Terjadi di Turki

Menurut Graham T. Allison, Permasalahan suatu negara merupakan sebuah tahapan yang akan di tindak lanjuti oleh negara sebagai pembuat kebijakan dalam menangani suatu permasalahan yang terjadi, tindakan dipilih sebagai tanggapan untuk masalah yang dihadapi sebuah negara. (Allison, 32-33)

Dalam hal ini Turki sebagai aktor yang mempunyai permasalahan, permasalahan yang membuat Turki harus mengubah kebijakanya terhadap negara Suriah, awal mula kebijakan ini diterapkan adalah pada saat tahun 2011, di mana Turki berkomitmen untuk membuka pintu perbatasanya terhadap Suriah, hal ini berdampak besar akibat konflik yang dialami oleh Suriah terhadap negara Turki dan berdampak seperti perekonomian Turki, konflik yang terjadi ini mengakibatkan banyaknya pengungsi yang masuk, dan diperkirakan sekitar 2,7jt dan setiap harinya mengalami peningkatan angka (UNHCR,2016).

Provinsi Hatay merupakan provinsi yang dihuni oleh penduduk yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani jeruk, akibat konflik yang terjadi ini berdampak pada ekonomi di provinsi hatay karena berkurangnya sarana transportasi karena keamanan yang disebabkan oleh anggota kelompok jihadis yang menyamar sebagai pengungsi di sisi lain pendapat warga akibat menurun nya pendapat ekspor jeruk yang diperkirakan menurun sekitar 28% dibandingkan tahun-tahun sebelumnya karena banyaknya transportasi yang menghentikan semua kegiatannya akibat peperangan yang terjadi. (Sendika, 2016)

Penurunan sector wisata juga salah satu dampak akibat ancaman keamanan yang terjadi di Turki, akibat berbagai serangan yang terjadi di Turki pariwisata Turki mengalami penurunan yang signifikan selama dua tahun berturut turut, penurunan yang terjadi sekitar 23%, menurut sumber operator wisata terbesar di dunia (TUI) pada tahun 2016 sendiri terjadi sekitar 40% pesanan wisata menuju Turki dibatalkan karena alasan keamanan, selain itu delapan perusahaan kapal pesiar membatalkan pelayaran wisatanya menuju Turki dengan alasan yang sama.(cnnindonesia.com, 2016)

Mengingat banyaknya pengungsi yang masuk, Turki menghadapi tantangan besar, dan pendapatannya dari pariwisata dan ekspor menurun. Selain berdampak pada sector ekonomi di Turki, konflik yang terjadi ini juga mempengaruhi berbagai sector lainya seperti tingkat keamanan karena diketahui meningkatnya jumlah anggota jihad yang berafiliasi terhadap Islam keras dan mereka berkamuflase menjadi seorang migrasi untuk memperoleh akses ketika ingin masuk ke wilayah Turki, selain itu Turki juga mendapat sanksi dari negara sahabat karena kebijakan yang diterapkan akibat pemasalahan ini (Syukran & Ubaidullah, 2019).

2.3 Kebijakan Sementara Turki Terhadap Suriah Sebagai Static Selection

Allison mendefinisikan static selection atau yang biasa dikenal dengan kebijakan sementara merupakan sebuah tahapan yang berisi tindakan sementara dari keputusan awal yang masih memungkinkan untuk berubah dari sebuah permasalahan yang terjadi dan sebuah solusi sementara. (Allison, 32-33)

Kebijakan mengacu pada seperangkat gagasan dan sila berperan sebagai pedoman dan tumpuan ketika akan menyelenggarakan suatu aktivitas, *leadership* dalam suatu organisasi dan menjadi pedoman dalam pencapaian tujuan yang telah

ditetapkan. *Term* atau ketentuan yang merupakan kebijakan pada prinsipnya diaplikasikan oleh organisasi, pemerintahan, dan kelompok atau komunitas serta individu. Jadi, kebijakan mempunyai implikasi penting pada kepemimpinan pemerintahan di suatu negara sehingga dalam pengambilan keputusan dan tindakan-tindakannya mampu berjalan efektif, efisien dan terfokus. (Marbun 2005, 265)

Pelaksanaan pengambilan kebijakan merupakan satu tahapan dalam memilih pada alternatif-alternatif yang tersedia. Para *decision maker* melaksanakan tindakan dalam bentuk pengambilan keputusan yang pada dasarnya tidak menjadi keputusan tunggal atau menjadi beberapa keputusan. Pengambilan keputusan dapat didefsinisikan sebagai pembuatan keputusan alternatif terbaik dari berbagai pilihan yang ada. Peterson menyatakan bahwa sebuah kebijakan pemerintahan dalam bidang apapun – ekonomi, politik, pemerintahan, pertahanan, keamanan, dan sebagainya – memiliki peranan penting dalam menjaga konstalasi pada suatu negara. Kebijakan-kebijakan pemerintahan dilakukan untuk membuatan diferensiasi dengan rencana-rencana individu dengan institusi. Seringkali terjadi kegagalan transformasi nilai pada negara-negara dunia ketiga pada tindakan yang dilakukan dalam menyelamatkan kondisi perekonomian negaranya.

Untuk itu, kebijakan-kebijakan pemerintahan harus dilakukan dengan perencanaan dan pertimbangan yang matang agar mampu menjadi tindakan solutif sehingga keberlanjutan pemerintahan dan kebijakan itu sendiri menjadi tidak terputus. (Peterson 2003, 19)

Tujuan dari kebijakan luar negeri Turki tentunya untuk melindungi kepentingan Turki secara domestik, di wilayah regional dan internasional yang

sangat dinamis dan terkadang bergejolak serta mengkonstruksi terbentuknya pembangunan dan perdamaian yang berkesinambungan. Pencapaian tujuan tersebut tentunya dilakukan oleh Turki melalui kontribusi dalam menciptakan perdamaian, kemakmuran dan stabilitas di tataran global.

Turki merupakan pendukung utama negara Suriah pada saat pertama kali perang, sedangkan Rusia merupakan pendukung pemerintah Suriah. Pertemuan yang akan dilakukan oleh ketiga negara ini merupakan pertemuan tingkat tertinggi antara kedua musuh perang sejak 2011 yang lalu. Jutaan orang terpaksa mengungsi akibat krisis di Suriah, di mana krisis ini yang telah merenggut ratusan ribu nyawa dan mengundang belas kasih dari seluruh dunia. Akan tetapi perang yang telah memasuki babak kedua ini tidak se intens perang sebelumya. Dengan dukungan dari pemerintah Rusia dan Iran pemerintah Suriah telah memulihkan Sebagian beberapa wilayah suriah. Menteri Pertahanan Suriah dan Turki telah melakukan pertemuan di kota Moskow dan membicarakan mengenai migrasi dan dan kelompok Kurdistan. Pemerintah Suriah telah mendesak pemerintah Turki untuk melakukan dukungan terhadap negaranya sedangkan Menteri pertahanan Turki sendiri tidak akan mengambil sebuah keputusan yang akan menimbulkan masalah bagi negara nya. (Republika Internasional, 2023**)**

Fakta dalam Sejarah mengatakan adanya Sejarah yang kompleks dalam hubungan antara Suriah dan Turki. Hal ini dibedakan dengan interval konflik dan kerja sama yang bergantian. Sejarah Kekaisaran Ottoman yang menindas adalah tempat dimulainya pertempuran antara kedua negara ini. Diketahui, alasan dari permusuhan abadi ini adalah pembunuhan beberapa penduduk Suriah yang ikut ketika terjadinya perlawanan Arab terhadap Ottoman. Kemudian, Pemerintah Turki

juga melakukan penyatuan antara provinsi Suriah dan Hatay pada tahun 1939. Kondisi ini menjadi pemicu dua negara mengalami perdebatan yang sengit. Di sisi lain, diketahui adanya kekhawatiran utama penduduk tentang perairan. Kondisi ini diawali dengan aktivitas Turki yang melakukan pembangunan infrastruktur berupa bendungan antara sungai Eufrat dan Tigris pada tahun 1970, dan sungai-sungai ini berasal dari dua perbatasan Turki. Kondisi ini didasarkan pada asumsi bahwa kekalahan besar sedang terjadi di Suriah dan Irak. Ketegangan 2 negara tersebut sebagian disebabkan karena Suriah lebih mendukung Partai Pekerja Kurdistan, di mana Turki menganggap bahwa partai ini menjadi organisasi yang berisikan terorisme.

Hubungan bilateral Turki sempat memburuk pada tahun 2011, pecahnya perang saudara di Suriah menjadi penyebabnya. Presiden Suriah, Bashr Al-Assad, juga mendapat kecaman dari pemerintah Turki karena menggunakan kebrutalan terhadap pengunjuk rasa dan melatih penentang baik di dalam maupun di luar perbatasannya. Di mana hal ini yang menyebabkan perselisihan perbatasan antara Suriah dan Turki. Dengan adanya perang saudara ini mendorong perubahan kebijakan luar negri Turki sehingga hubungan antara Turki dengan Suriah tidak berubah dikarenakan presiden Suriah Bashar al-assad juga tetap pada pendirian nya yaitu menolak bertemu dengan presiden Erdogan sampai ‘pendudukan” Turki di selesaikan, namun sebaliknya presiden Erdogan pun bersedia bertemu dengan Presiden Suriah akan tetapi dengan menolak tegas penarikan total pasukan militer Turki.**(**Annamira,2023)

Perdamaian antara Turki dengan Suriah juga tergantung dari hubungan antara Turki dan Rusia, hal ini dikarenakan peran penting kerja sama antara Turki dengan

Rusia dalam hal gencatan senjata yang dilakukan pada saat setelah Azerbaijan membebaskan wilayah karabakh atas penduduk Armenia, serta perdamaian yang abadi dari kedua negara kaukasia ini. Rusia dan Turki sendiri mempunyai hubungan ekonomi dimana Turki mempunyai investasi di Rusia yang mencapai 1,5 Miliar USD begitupun sebaliknya Rusia mempunyai investasi di Turki mencapai 6,5 Miliar USD. Proyek investasi besar antara Turki dan Rusia ini sedang berlanjut sesuai dengan rencana perdagangan bilateral dan meningkat sekitar 50% dari Sembilan bulan pertama dan mampu menutupi kerugian sebelumnya.(Aliyev, et al., 2021)

Erdogan selaku presiden Turki sangat menjunjung tinggi keyakinan bahwa memajukan kepentingan dan kemajuan bangsa dapat dicapai melalui penerapan kebijakan luar negeri yang agresif dan memperkuat perekonomian (Islam dan Purnama, 2018).

Presiden Erdogan yakin bahwa gagasan yang dimiliki akan mempengaruhi banyak aspek untuk negara Turki dan bisa menjalin hubungan yang baik dengan negara tertangga salah satunya Rusia hal tersebut seperti yang diungkapkan didalam pidato presiden Erdogan sendiri yang berisi :

"*Negara Turki akan semakin mendekati tujuan utama kami, yaitu mewujudkan kebijakan luar negeri yang harmonis. Kami juga akan menerapkan kebijakan luar negeri kami untuk meningkatkan kesadaran akan isu-isu yang ada dan untuk meningkatkan lingkungan politik, sosial, dan ekonomi negara agar masyarakat lebih makmur dan lebih siap melawan tantangan permasalahan saat ini dan yang akan datang*" (Erdogan, 2015).

Dalam hal ini presiden sebagai aktor mempunyai peran sebagai *Decision maker* mempunyai tanggung jawab sebagai pengambil keputusan dalam negara yang di pimpinnya, keputusan tersebut bisa saja bersifat mutlak maupun sementara karena pada dasarnya, para pembuat keputusan sudah menimbang konsekuensi atas tindakan yang dipilih sebagai pilihan yang terbaik atas pilihan – pilihan yang lainnya.

BAB 3
KEBIJAKAN TURKI SEBAGAI PILIHAN RASIONAL DALAM MENYIKAPI KRISIS PENGUNGSI SURIAH PADA TAHUN 2016-2017

Penelitian ini akan melakukan penelitian terhadap perubahan strategi kebijakan luar negeri Turki dengan fokusnya kepada terjadinya kondisi konflik di Suriah pada tahun 2016 dan 2017. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan topik ini, karena banyaknya faktor kompleks yang mempengaruhi peristiwa tersebut. Pertama-tama, faktor internal Turki seperti keamanan nasional, stabilitas politik, dan kepentingan ekonomi memainkan peran krusial dalam menentukan arah kebijakan luar negeri terkait Suriah. Selain itu, faktor-faktor eksternal seperti dinamika regional di Timur Tengah, hubungan dengan sekutu dan lawan politik, serta tekanan internasional juga turut memengaruhi perubahan strategi Turki. Selain itu, faktor internal Suriah seperti dinamika konflik, perubahan politik, dan keamanan di negara tersebut juga menjadi pertimbangan penting bagi Turki dalam menyesuaikan kebijakan luar negerinya. Selama periode tersebut, terjadi pergeseran signifikan dalam pendekatan dan strategi Turki terhadap krisis Suriah, yang dapat dipahami melalui analisis mendalam terhadap faktor-faktor tersebut. Berikut ini adalah model pengambilan keputusan menurut perspektif Graham T. Allison yang disesuaikan dengan topik penelitian ini:

3.1. Penetapan Tujuan atau Goals

Dalam teori pembuatan keputusan, penetapan tujuan merupakan langkah kritis yang memandu proses pengambilan keputusan. Menurut Graham Allison, ahli teori kebijakan, penetapan tujuan merupakan tahap awal yang mengarahkan aktor kebijakan untuk menetapkan tujuan akhir ketika melakukan sesuatu, keadaan atau

situasi tertentu. Tujuan ini bisa berupa pencapaian tertentu, perubahan perilaku, atau solusi dari masalah yang dihadapi. Allison menekankan bahwa penetapan tujuan haruslah jelas, spesifik, dan dapat diukur agar memungkinkan evaluasi yang efektif terhadap keberhasilan dalam mencapainya. Selain itu, penetapan tujuan yang baik juga harus memperhitungkan ketersediaan sumber daya yang ada dan berbagai faktor kontekstual lainnya yang dapat mempengaruhi proses pembuatan keputusan. Dengan penetapan tujuan yang tepat, aktor kebijakan dapat mengarahkan upaya mereka secara efisien dan efektif menuju pencapaian hasil yang diinginkan (Darmawan & Karmilawaty, 2023).

Tahap pertama adalah menetapkan tujuan atau goals yang ingin dicapai dalam menghadapi krisis Suriah. Tujuan ini dapat berkaitan dengan keamanan nasional, stabilitas regional, atau kepentingan ekonomi Turki. Secara geografis, Suriah dan Turki berada di wilaya yang berdampingan, dengan begitu juga berdampak pada hubungannya terkati perekonomian, perpolitikan, dan kebudayaan yang telah terjalin selama bertahun-tahun. Suriah, sebagai negara yang pernah menjadi bagian dari Kekaisaran Ottoman dan memiliki pengaruh lama di Timur Tengah, memperkuat ikatan historis antara keduanya. Pada awal abad ke-21, upaya untuk memperkuat hubungan antara keduanya semakin meningkat, terutama dengan kunjungan Presiden Suriah *Bashar Al Assad* ke Ankara pada Januari 2004 Diketahui, awal abad 21 terdapat upaya yang lebih besar untuk meningkatkan kekerabatan yang positif antara 2 negara tersebut, khususnnya setelah Presiden Suriah Bashar Al Assad di bulan januari 2004 saat mengunjungi Ankara.

Pertemuan tersebut menjadi tonggak penting dalam memperluas hubungan ekonomi melalui perdagangan bebas dan kerjasama dalam hal keamanan serta

penyelesaian konflik di kawasan Timur Tengah. Dampak positif dari pertemuan ini terasa dalam beberapa tahun berikutnya, mengarah pada pembentukan pola hubungan yang lebih positif di antara kedua negara, yang jauh berbeda dengan periode sebelumnya pada tahun 1990-an (Zikri, 2021).

Kepentingan keamanan nasional Turki juga dianggap sebagai hal yang paling penting dalam perlindungan integritas teritorial di mana stabilitas sebagai landasan juga merupakan tujuan yang ingin dicapai. Masalah stabilitas dan keamanan dalam negeri berkontribusi pada perubahan strategi kebijakan luar negeri Turki dalam krisis Suriah yang mengacu pada situasi internal yang tidak mungkin diabaikan oleh para pengambil keputusan. Lingkungan internal seperti itu mungkin merupakan hal yang paling dipertimbangkan sebelum orang lain. Sementara, faktor-faktor lain tentunya memperkuat prioritas pemenuhan kebutuhan vital di tingkat domestik. Dalam hal ini, stabilitas dan keamanan internal Turki sedang bermasalah akibat semakin besarnya pengaruh PKK dan PYD, ancaman ISIS dan peristiwa kudeta yang hanya mengancam pemerintah yang berkuasa serta ketertiban dalam negerinya (Luerdi & Alfajri, 2018).

Sejak tahun 2016, Turki telah mengadopsi strategi *bandwagoning* dengan Rusia dalam bentuk *piling on bandwagoning* dan *jackal bandwagoning*, yang dipicu oleh keberadaan Kurdi Suriah (YPG/PYD). Strategi *bandwagoning* sendiri merupakan strategy yang diambil oleh negara yang merasa dirinya adalah negara lemah. Selain itu, dalam gagasan ini juga menjabarkan mengapa negara yang tidak mempunyai kekuatan dituntut untuk memiliki hubungan yang baik dengan musuh mempunyai kekuatan lebih besar. Di mana, 2 negara tersebut bisa saja menundukkan suatu objek melalui kekuatan (Mersheimer,2001).

Kelompok Kurdi Suriah ini dianggap sebagai bagian dari Partiya Karkereˆn Kurdistan (PKK) oleh AKP, yang dilihat sebagai ancaman terhadap stabilitas keamanan Turki. Schweller mengatakan bahwa terjadinya *piling on bandwagoning* apabila hasil dari perang telah diketahui, di mana negara cenderung mendukung pihak yang menang untuk keuntungan mereka sendiri. *Jackal bandwagoning*, bentuk ekstrem dari *piling on bandwagoning*, terjadi pada tahap akhir perang. Turki telah melakukan perubahan signifikan dalam kebijakan luar negerinya setelah tahun 2016, terutama karena kesadaran akan keterbatasan kekuatannya (Anissa, 2021).

Kebijakan luar negeri Turki terhadap Suriah juga meliputi berbagai aspek, termasuk memperkuat stabilitas di wilayahnya dengan mempromosikan demokrasi dan hormat akan penerapan HAM (Hak Asasi Manusia). Selain itu, Turki memulai langkah-langkah untuk memperkuat hubungan bilateral dan memberikan dukungan nyata dalam menyelesaikan masalah Turki-Suriah (PARTi). Kemudian, terkait perekonomian negara Turki melakukan perluasan dan memperkuat relasi dagang dengan negara Suriah. Hal ini ditunjukkan dari pemberian dukungan pembisnis dan pejabat Turki yang memberikan investasi. Diketahui, dalam penguatan bisnis di negara Suriah, Turki didukung dengan beberapa organisasi, yaitu Dewan Hubungan Ekonomi Luar Negeri, Asosiasi Pengangkut Internasional, dan Asosiasi Kontraktor Turki. Kemudian, perdagangan ini juga didukung dari perusahaan local lainnya, seperti Kamar Dagang Diyarbakir, Gaziantep Chamber of Commerce, serta Kamar Dagang Instanbul. Selain itu, bidang komunikasi juga dikuasai Turki untuk memperkuat hubungan bisnis dengan negara Suriah, menumbuhkan suasana yang mendukung, memperkuat persepsi baik terhadap negara Turki, dan memberikan

pandangan positif terhadap jenjang kehidupan selanjutnya (Islam & Purnama, 2018).

Kebijakan luar negeri Turki terhadap Suriah, menyoroti berbagai aspek seperti penetapan tujuan terkait keamanan nasional, stabilitas regional, dan kepentingan ekonomi. Ikatan sejarah, ekonomi, dan budaya Turki yang erat dengan Suriah semakin ditekankan, bersamaan dengan upaya memperkuat hubungan bilateral melalui inisiatif seperti perjanjian perdagangan dan kerja sama keamanan. Selain itu, hal yang dimaksud tersebut di atas juga membahas perubahan strategis Turki, khususnya sejak tahun 2016, yang mengadopsi strategi ikut-ikutan dengan Rusia karena kekhawatiran terhadap kelompok Kurdi di Suriah. Di samping itu, tantangan keamanan dalam negeri Turki, termasuk ancaman dan ketidakstabilan PKK yang disebabkan oleh peristiwa seperti kudeta dan aktivitas ISIS.

Lebih lanjut, tindakan kebijakan luar negeri Turki di Suriah, termasuk untuk mendorong demokrasi, menghormati hak asasi manusia, dan mendorong kerja sama ekonomi. Keterlibatan Turki dalam perdagangan, investasi, dan kemitraan bisnis dengan entitas Suriah, serta perannya dalam bidang telekomunikasi dan teknologi adalah untuk mendukung kolaborasi dengan Suriah dan memproyeksikan citra positif bagi masa depan Turki.

Dalam teori pembuatan keputusan, penetapan tujuan merupakan langkah kritis yang memandu proses pengambilan keputusan. Menurut Graham Allison, ahli teori kebijakan, penetapan tujuan merupakan tahap awal yang mengarahkan aktor kebijakan untuk menetapkan tujuan akhir ketika melakukan sesuatu, keadaan, atau situasi tertentu. Tujuan ini bisa berupa pencapaian tertentu, perubahan perilaku, atau solusi dari masalah yang dihadapi. Allison menekankan bahwa penetapan

tujuan haruslah jelas, spesifik, dan dapat diukur agar memungkinkan evaluasi yang efektif terhadap keberhasilan dalam mencapainya. Selain itu, penetapan tujuan yang baik juga harus memperhitungkan ketersediaan sumber daya yang ada dan berbagai faktor kontekstual lainnya yang dapat mempengaruhi proses pembuatan keputusan. Dengan penetapan tujuan yang tepat, aktor kebijakan dapat mengarahkan upaya mereka secara efisien dan efektif menuju pencapaian hasil yang diinginkan (Darmawan & Karmilawaty, 2023).

Dalam konteks krisis Suriah, penetapan tujuan kebijakan luar negeri Turki melibatkan beberapa aspek penting. Tahap pertama adalah menetapkan tujuan atau goals yang ingin dicapai dalam menghadapi krisis Suriah. Tujuan utama ini termasuk keamanan nasional, stabilitas regional, dan kepentingan ekonomi Turki. Keamanan nasional Turki sangat terkait dengan stabilitas di perbatasannya dengan Suriah, mengingat ancaman dari kelompok-kelompok seperti PKK dan ISIS yang dapat mempengaruhi integritas teritorial dan stabilitas dalam negeri Turki. Di samping itu, stabilitas regional juga menjadi perhatian utama, terutama karena ketidakstabilan di Suriah dapat berdampak langsung pada situasi di wilayah perbatasan dan hubungan Turki dengan negara-negara tetangga lainnya.

Turki juga memiliki tujuan jangka panjang untuk menjadi bagian dari Uni Eropa, yang memberikan insentif bagi negara tersebut untuk berpartisipasi dalam kerjasama internasional dan menunjukkan komitmen terhadap nilai-nilai Eropa seperti demokrasi dan hak asasi manusia. Upaya ini diperkuat oleh strategi kebijakan luar negeri Turki yang berusaha memperkuat hubungan bilateral dengan negara-negara Uni Eropa serta mendukung integrasi ekonomi dan politik yang lebih besar dengan Eropa. Melalui penetapan tujuan yang jelas dalam kebijakan luar

negeri terhadap Suriah, Turki berusaha menunjukkan bahwa negara ini adalah mitra yang dapat diandalkan dan layak untuk menjadi anggota Uni Eropa.

Namun, ada juga alternatif lain yang bisa dipertimbangkan dalam kebijakan luar negeri Turki. Salah satunya adalah strategi diversifikasi aliansi, di mana Turki tidak hanya bergantung pada hubungan dengan Uni Eropa dan Amerika Serikat, tetapi juga memperkuat hubungan dengan kekuatan regional lain seperti Rusia dan China. Selain itu, Turki dapat mengadopsi pendekatan yang lebih otonom dalam kebijakan luar negerinya, dengan mengurangi ketergantungan pada aliansi tradisional dan lebih fokus pada penguatan kapasitas internal, termasuk sektor ekonomi dan militer. Alternatif lain adalah pendekatan multilateral dalam menyelesaikan konflik Suriah, di mana Turki bekerja sama dengan organisasi internasional dan negara-negara lain untuk mencari solusi damai dan berkelanjutan bagi krisis tersebut.

Dengan mempertimbangkan berbagai tujuan dan alternatif kebijakan, Turki dapat lebih fleksibel dalam menavigasi tantangan regional dan internasional, sambil tetap menjaga kepentingan nasionalnya dan aspirasi untuk menjadi bagian dari Uni Eropa.

3.2 Alternatif Kebijakan

Menurut Allison, identifikasi alternatif kebijakan merupakan langkah penting dalam proses pengambilan keputusan. Allison menekankan pentingnya bagi pembuat kebijakan untuk mengidentifikasi berbagai pilihan atau alternatif kebijakan yang dapat diambil guna meraih harapan. Perencanaan kebijakan ini menjadi alternatif yang berwujud strategi, tindakan, atau kebijakan yang berbeda yang memiliki potensi untuk menghasilkan hasil yang diinginkan. Allison

menekankan bahwa identifikasi alternatif kebijakan yang komprehensif dan kreatif dapat membantu pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan berbagai kemungkinan dan memilih tindakan yang paling sesuai dengan kondisi dan tujuan yang ada. Dengan mempertimbangkan berbagai alternatif kebijakan ini, pembuat kebijakan dapat meningkatkan kualitas keputusan mereka dan mengurangi risiko terkait dengan pilihan yang diambil.

Identifikasi Alternatif Kebijakan merupakan tahapan dalam model pengambilan keputusan yang bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai pilihan tindakan atau kebijakan yang mungkin diambil untuk menanggapi situasi atau permasalahan yang dihadapi. Tahap ini, yang berkaitan dengan penyesuaian strategi kebijakan luar negeri Turki selama krisis Suriah pada tahun 2016-2017, dan merupakan langkah-langkah mencari tahu pilihan atau kebijakan lain yang dapat ditetapkan sebagai keputusan presiden Turki sebagai reaksi terhadap peristiwa di Suriah.

Turki memiliki kebijakan sendiri dalam peranannya di Suriah. Turki memberikan larangan terhadap masyarakatnya untuk melakukan pemberontakan, seperti perang. Kebijakan tersebut ditetapkan karena banyak yang mendukung Suriah dan ingin menutup perbatasan serta memberikan bantuan terhadap Suriah dalam perjuangan untuk memberontak atas perilaku ISIS. Di sini, dukungan tidak diberikan negara Turki kepada Suriah dalam kampanye militernya untuk memberontak atas perilaku ISIS. Namun, Turki memberikan respons baik terhadap pengungsi Suriah dengan menampung lebih dari 3,5 juta pengungsi dan membangun 22 tempat pengungsian dengan fasilitas dasar seperti perumahan, dapur, dan pelayanan kesehatan. Negara Turki ini dapat memberikan bantuan

terhadap migrasi dari Suriah juga karena menjalin relasi dengan WHO dan UNHCR. Pemerintah Turki juga memiliki rencana jangka panjang untuk memberikan solusi agar pengungsi dapat bekerja secara legal di negara tersebut. Langkah-langkah Turki ini merupakan upaya untuk menegaskan harga diri Turki di hadapan masyarakat Arab dan mendukung perjuangan rakyat Suriah. Sehingga di wilayah Timur Tengah maupun seluruh dunia, negara Turki memegang pemeran utama (Mudore & Safitri, 2019).

Turki juga menjadi negara yang mendukung kekuatan oposisi di negara Suriah. Oposisi tersebut terdiri dari *Free Syrian Army* dan *Syrian National Coalition for Revolutionary and Opposition Force.* Isu militan Kurdi juga membuat Turki merasakan kekhawatiran atau kecemasan. Karena, Turki tidak pernah menyetujui keberpihakkan yang diterima minoritas Kurdi selama ini dari pemerintahan Assad. Turki khawatir bahwa jika rezim Assad roboh, bantuan yang diberikan Suriah kepada bangsa Kurdi akan berkurang. Oleh karena itu, Turki memainkan peranannya dengan mempertimbangkan berbagai aspek politik dan keamanan di kawasan tersebut. Hal ini mencerminkan kompleksitas dinamika politik yang terjadi di Suriah dan kawasan sekitarnya (Herlambang, 2020).

Jika Turki menolak untuk menerima pengungsi dari Suriah, negara tersebut dapat dianggap tidak mau bekerja sama dan tertutup oleh komunitas internasional, terutama oleh Uni Eropa dan negara-negara Barat. Penolakan ini juga dapat memperburuk hubungan diplomatik Turki dengan negara-negara yang mendukung upaya kemanusiaan di Suriah, serta berpotensi menurunkan citra Turki sebagai negara yang peduli pada isu kemanusiaan dan pengungsi. (Syukran & Ubaidillah, 2019)

Suatu negara kemungkinan besar juga akan mencari identifikasi alternatif dengan menetapkan kebijakan yang berbeda, dikarenakan hal tersebut akan memberikan negara tersebut kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap negara-negara lainnya yang lebih lemah. Maksud konsep ini secara spesifiknya mengarah kepada pembentukan gagasan guna melakukan pencarian terhadap kebijakan pengganti yang mengacu pada kekuatan keamanan dalam menjaga ciri khas pada bidang politik, kebudayaan, dan fisik yang telah mendapatkan keterlibatan dari pihak eksternal. Identifikasi alternatif terhadap kebijakan saat ini merupakan bentuk usaha yang dilakukan guna mewujudkan tujuannya, yaitu mencapai kemakmuran dan keberlanjutan pemerintah. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa negara yang menetapkan strategi alternatif, yaitu sebagai pertahanan terhadap integrasi nasional dan kedaulatan politiknya sekaligus menjaga kesejahteraan warganya dalam skala global. Pada dasarnya, penerapan identifikasi alternatif kebijakan ini adalah bentuk dari harapan, pandangan, serta keinginan negara dalam meraih suatu hal yang menjadi tujuan utama negara, yang salah satunya adalah melindungi keinginan negara.

Identifikasi alternatif kebijakan didalamnya memiliki beberapa komponen antara lain, yaitu perekonomian, ideologi, ketahanan militer, kebajikan, serta asas legalitas. Berdasarkan komponen ini, perekonomian menjadi kebijakan yang wajib ditetapkan pada setiap negara guna mengembangkan dan meningkatkan finansial masing-masing penduduknya. Kemudian, politik luar negeri juga menggunakan identifikasi alternatif kebijakan sebagai gagasan utamanya.

Gagasan ini juga dapat diinstruksikan kepada negara yang berideologi terhadap banyak negara lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa baik

kepentingan ekonomi maupun alasan ideologis dapat menjadi landasan pilihan dan aktivitas kebijakan luar negeri. Tetapi, kemungkinan juga terdapat keterkaitan antara ideologi dan perekonomian negara, di mana mempunyai kecenderungan pada hubungan dan pengaruh yang dapat menguatkan keduanya. Dengan begitu, akan mengembangkan pendekatan segar atau unik terhadap kebijakan internasional. Sehingga, perumusan kebijakan alternatif suatu negara merupakan respon terhadap tuntutannya dan merupakan upaya untuk memperoleh kewenangan. Jadi, hal ini secara keseluruhan dapat ditunjukkan melalui komponen politik, ekonomi, keamanan, dan sosial budaya.

Kebijakan Turki dengan membuka akses pintu bagi migrasi yang berasal dari Suriah masih terkait erat dengan strategi alternatif yang ingin diterapkan. Meskipun demikian, penerapan kebijakan alternatif masih mengalami berbagai kesulitan karena hasil yang justru tidak sesuai perencanaan. Sehingga, kebijakan ini masih mempunyai kelebihan dan kekurangan dari prosedur ini. Pada tahap ini, pemerintah Turki harus mempertimbangkan berbagai opsi kebijakan yang tersedia, seperti diplomasi, intervensi militer, dukungan kepada pihak-pihak tertentu di Suriah, atau campur tangan kemanusiaan. Setiap opsi tersebut memiliki konsekuensi yang berbeda-beda, baik dari segi politik, ekonomi, maupun keamanan.

Identifikasi Alternatif Kebijakan memungkinkan pemerintah Turki untuk memperluas cakupan penilaian mereka dan mempertimbangkan berbagai kemungkinan tindakan yang dapat diambil guna melengkapi harapan yang sebelumnya telah ditentukan. Pertimbangan atas banyaknya alternatif kebijakan membuat pemerintah Turki dapat mengevaluasi potensi dampak positif dan negatif dari setiap opsi, serta memperhitungkan faktor-faktor internal dan eksternal yang

memengaruhi konteks krisis Suriah. Identifikasi Alternatif Kebijakan memberikan landasan yang kuat ketika akan melangsungkan penetapan keputusan secara rasional dan berbasis informasi komprehensif dalam menentukan arah kebijakan luar negeri Turki terkait krisis Suriah (Syukran & Ubaidullah, 2019).

3.3 Konsekuensi

Teori Allison, yang diperkenalkan oleh Graham T. Allison, adalah kerangka konseptual yang digunakan untuk menganalisis dan memahami proses pengambilan keputusan dalam politik luar negeri. Teori ini menekankan pentingnya faktor-faktor seperti tujuan, identifikasi alternatif kebijakan, konsekuensi, dan pilihan dalam pilimembentuk keputusan politik luar negeri suatu negara. Allison berpendapat bahwa pembuat kebijakan sering dihadapkan pada lingkungan yang kompleks dan tidak pasti, di mana berbagai faktor internal dan eksternal mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Penerapan teori Allison, diterapkan untuk melakukan penganalisaan guna mengetahui lebih dalam terkait perubahan yang berperan pada saat melakukan prosedur dalam memutuskan kebijakan internasional dan menentukan elemen yang memberikan pengaruh terhadap keputusan tersebut.

Evaluasi Konsekuensi atau Assessment dalam kerangka penyesuaian pendekatan kebijakan luar negeri Turki sepanjang konflik Suriah 2016–2017 merujuk pada tahap di mana Turki melakukan penilaian mendalam terhadap hasil yang mungkin timbul dari berbagai alternatif kebijakan yang dipertimbangkan. Dalam tahap ini, Turki mempertimbangkan konsekuensi positif dan negatif dari setiap pilihan kebijakan yang mungkin diambil terkait dengan krisis Suriah.

Turki melakukan analisis mendalam terhadap bagaimana setiap kebijakan yang dipilih dapat memengaruhi keamanan nasional, stabilitas politik, dan kepentingan ekonomi internal negara. Selain itu, Turki juga mengevaluasi bagaimana setiap langkah dapat berdampak pada dinamika regional di Timur Tengah, hubungan dengan sekutu dan lawan politik, serta tekanan internasional yang dihadapi.

Evaluasi Konsekuensi atau Assessment terhadap Dimensi Pengawasan Pemerintahan menunjukkan perbaikan yang substansial. Namun demikian, perkembangan ini diketahui berhenti karena mengingat lebih banyaknya jumlah negara yang sudah menyetarakan tingkat pengawasan pemerintah di tahun 2005-2015. Meskipun banyak negara lebih memilih untuk menganut model serupa dalam hal ini, masih terdapat perbedaan geografis yang mencolok dalam cara penyelenggaraan pemerintahan perwakilan,

Sedangkan pada waktu itu, Turki tidak menyetujui pemerintahan Bashar Al-Assad di Suriah dan telah merekomendasikan reformasi dalam pemerintahan tersebut. Turki menegaskan, bahwa konflik dalam negeri Suriah harus diselesaikan, Namun, pemerintah Suriah menolak desakan tersebut. Sebagai respons, Pemerintahan Turki telah memblokir pesawat yang mengirimkan perangkat keras militer ke Suriah untuk menggunakan wilayah udara Turki sebagai salah satu larangan yang diberlakukan Turki terhadap negara Suriah. Hal tersebut menunjukkan adanya konflik antar kedua negara tersebut, di mana diketahui puncah konflik ini terjadi pada 26 Maret 2012, saat itu juga negara Turki melakukan penutupan terhadap kedutaannya di Damaskus. Selanjutnya, Turki di bawah kepemimpinan Presiden Erdogan berupaya untuk mendukung upaya dalam

menjatuhkan rezim Al-Assad dengan melalui perhentian dukungan alat militer terhadap Suriah saat akan melangsungkan pemberontakan dan menumpas ISIS. Turki juga melarang warganya untuk ikut berperang di Suriah sebagai bagian dari upaya memerangi kelompok tersebut (Suhartini & Meisha Calista, 2022).

Diketahui terdapat berbagai hal yang meliput inisiatif di seluruh wilayah untuk melemahkan demokrasi dengan membatasi otoritas dan independensi lembaga, media, dan parlemen. Fungsi parlemen sering kali diremehkan demi kekuasaan eksekutif, di mana hal ini selalu mendapatkan pembenaran karena adanya bahaya, daya guna, serta kebutuhan nasional. Strategi umum yang digunakan untuk mengkoalisi kewenangan dan membungkam oposisi, seperti tidak memihak peraturan pencemaran nama baik dan perpajakan, memberikan batasan terhadap Masyarakat untuk mengakses informasi politik dan administratif, serta pencalonan hakim, otoritas publik dan anggota dewan media (Natalia, 2018).

Dalam melakukan evaluasi ini, Turki juga mempertimbangkan faktor internal Suriah, seperti dinamika konflik, perubahan politik, dan keamanan di negara tersebut. Dengan memahami konsekuensi potensial dari setiap langkah yang mungkin diambil, Turki dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi dan strategis dalam menyesuaikan kebijakan luar negerinya terkait krisis Suriah.

Jika Turki menolak untuk menerima pengungsi dari Suriah, negara tersebut dapat dianggap tidak mau bekerja sama dan tertutup oleh komunitas internasional, terutama oleh Uni Eropa dan negara-negara Barat. Penolakan ini juga dapat memperburuk hubungan diplomatik Turki dengan negara-negara yang mendukung upaya kemanusiaan di Suriah, serta berpotensi menurunkan citra Turki sebagai negara yang peduli pada isu kemanusiaan dan pengungsi. Di sisi lain, jika Turki

menerima pengungsi, negara tersebut bisa mendapatkan reputasi yang baik di mata Uni Eropa dan komunitas internasional sebagai negara yang berperan aktif dalam menangani krisis kemanusiaan. Selain itu, Turki berpotensi mendapatkan bantuan finansial dan dukungan politik dari Uni Eropa, yang dapat digunakan untuk menangani kebutuhan para pengungsi dan memperkuat kerjasama bilateral dalam berbagai bidang lainnya. (Syukran & Ubaidillah, 2019)

3.4 Pengambilan Keputusan atau Choice

Dalam teori Allison, konsep "choice" merujuk pada tahap terakhir dalam proses pengambilan keputusan politik luar negeri. Choice mengacu pada pemilihan dari berbagai alternatif kebijakan yang telah diidentifikasi. Hal ini memerlukan penimbangan setiap hasil potensial untuk setiap opsi yang akan dilakukan pertimbangan. Pada tahap ini, pembuat kebijakan harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti kepentingan nasional, nilai-nilai politik, respon internasional, dan implikasi jangka panjang dari setiap pilihan yang tersedia. Choice merupakan hasil akhir dari proses analisis yang cermat dan pertimbangan yang matang terhadap semua alternatif yang mungkin, dan keputusan yang diambil diharapkan dapat memenuhi tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dalam teori Allison, konsep "choice" merujuk pada pemilihan dari berbagai alternatif kebijakan yang telah diidentifikasi, dengan tujuan memaksimalkan nilai dari tindakan yang diambil. Dalam konteks kebijakan Turki terkait krisis pengungsi Suriah, pilihan untuk menerima pengungsi bisa dilihat sebagai langkah value-maximizing yang menawarkan berbagai keuntungan strategis dan ekonomis. Dengan menerima pengungsi, Turki dapat memperkuat reputasinya di mata Uni

Eropa dan komunitas internasional sebagai negara yang responsif dan bertanggung jawab dalam menghadapi krisis kemanusiaan.

Langkah ini juga membuka peluang bagi Turki untuk menerima bantuan finansial dari Uni Eropa, yang dapat digunakan untuk mengelola kebutuhan pengungsi serta memperbaiki infrastruktur dan layanan sosial di dalam negeri. Selain itu, penerimaan pengungsi dapat memperkuat posisi negosiasi Turki dalam upayanya untuk bergabung dengan Uni Eropa, serta meningkatkan pengaruhnya dalam dinamika politik regional. Keputusan ini juga sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan kepemimpinan aktif yang ditunjukkan oleh Presiden Erdogan, yang berperan penting dalam merancangan suatu kebijakan luar negeri secara proaktif serta strategis. Sehingga, pilihan dalam menerima pengungsi tidak hanya mencerminkan komitmen Turki terhadap tanggung jawab internasional, tetapi juga memaksimalkan manfaat yang dapat diperoleh dalam jangka panjang dari berbagai aspek politik, ekonomi, dan sosial.

Keputusan mewakili pilihan yang dibuat oleh presiden atau individu yang berwenang dalam menyusun suatu kebijakan. Dalam penelitian ini, fokusnya adalah pada analisis tingkat individu, khususnya Recep Tayyip Erdogan. Dia menghadapi beberapa pilihan mengenai suatu masalah di negaranya. Dia bisa saja memilih untuk mengambil pendekatan yang berbeda, seperti hanya memberikan bantuan kemanusiaan, tidak mengambil tindakan, atau bahkan menolak usulan tertentu. Namun di bawah kepemimpinan Erdogan, negara tersebut memilih kebijakan tertentu dan kemudian menetapkan peraturan terkait. Kepribadian pengambil keputusan ini menjadi bentuk faktor yang dapat memberikan pengaruh pilihan tersebut.

Kepribadian Erdogan yang antusias dan tegas memainkan peran penting dalam pilihan ini, karena Erdogan disini berperan sebagai pemimpin negara yang cakap secara nasional atau internasional. Presiden Erdogan ini berfokus untuk mengambil tindakan yang positif dalam kebijakan luar negeri, seperti inisiatif bantuan kemanusiaan, juga berkontribusi terhadap keputusan ini. Lebih jauh lagi, keinginan Erdogan untuk kemerdekaan Turki dan hubungan sebelumnya dengan para pemimpin lain mempengaruhi pendiriannya mengenai masalah ini. Selain itu, persepsi Erdogan mengenai nilai-nilai dan keyakinan bersama dengan kelompok tertentu juga berperan.

Faktor kelembagaan, seperti komitmen Turki terhadap perjanjian tertentu, dan dinamika birokrasi dalam pemerintahan juga mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Secara ekonomi, aspirasi Turki untuk menjadi anggota UE dan potensi manfaat yang terkait dengannya juga mempengaruhi keputusan tersebut. Demikian pula, dukungan Turki terhadap kelompok masyarakat tertentu dan strategi geopolitiknya juga menjadi faktor dalam proses pengambilan keputusan.

Secara keseluruhan, keputusan untuk mengadopsi kebijakan tertentu mempunyai banyak aspek dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk karakteristik individu, kerangka kelembagaan, pertimbangan ekonomi, dan strategi geopolitik. Selain itu, penulis menggunakan pendekatan berbasis kemanusiaan untuk mengatasi permasalahan mendasar dan meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan di wilayah tersebut (A'yuni, 2019).

BAB 4
PENUTUP

2.1. Kesimpulan

Dalam mengambil keputusan luar negeri terkait krisis Suriah, Turki menerapkan pendekatan rational actor yang mempertimbangkan berbagai faktor dengan cermat dan rasional. Proses pengambilan keputusan dimulai dengan identifikasi tujuan nasional yang jelas, seperti mempertahankan keamanan wilayah, menjaga stabilitas regional, dan mendukung kepentingan ekonomi. Setelah itu, Turki melakukan identifikasi alternatif kebijakan berdasarkan analisis yang komprehensif terhadap situasi yang ada, termasuk mempertimbangkan dampak dan risiko dari setiap pilihan yang tersedia. Para pengambil keputusan menggunakan data dan informasi yang akurat serta konsultasi dengan berbagai ahli dan lembaga terkait untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang kompleksitas krisis Suriah dan implikasinya bagi Turki. Dengan pendekatan ini, Turki berusaha untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil didasarkan pada pertimbangan yang logis dan objektif, sehingga dapat mencapai tujuan nasional secara efektif dan efisien. Berdasarkan rumusan masalah sebelumnya, maka kesimpulan yang bisa ditarik pada penelitian ini berdasarkan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan strategi kebijakan luar negeri Turki dalam krisis Suriah pada tahun 2016-2017 dengan model empat tahapan intelektual Graham T. Allison yang kemudian dapat dianggap sebagai model pengambilan kebijakan adalah sebagaimana berikut:

1. Kebijakan luar negeri Turki terhadap Suriah memiliki dimensi yang kompleks, yang melibatkan upaya untuk menciptakan kolaborasi yang

harmonis dengan pemerintah Suriah serta membangun citra positif bagi masa depan Turki. Dalam konteks ini, Turki berusaha untuk memperkuat hubungan diplomatik dengan Suriah sambil tetap mempertahankan kepentingan dan integritas nasionalnya. Selain itu, Turki juga berupaya untuk menjadi mediator yang konstruktif dalam menyelesaikan konflik di Suriah, dengan harapan dapat memperoleh dukungan internasional dan meningkatkan peran regionalnya sebagai pemain utama dalam urusan Timur Tengah.

2. Identifikasi alternatif kebijakan memegang peranan penting dalam proses pengambilan keputusan luar negeri Turki terkait krisis Suriah. Dengan mengidentifikasi berbagai alternatif kebijakan, pemerintah Turki dapat memiliki landasan yang kokoh untuk mempertimbangkan berbagai kemungkinan dan dampaknya. Hal ini memungkinkan proses pengambilan keputusan yang lebih rasional dan berbasis data. Dengan begitu, pengambilan perencanaan kebijakan dapat dijalankan secara efisien, serta sejalan terhadap kebutuhan nasional dan pendapat warganya.
3. Evaluasi yang cermat dan komprehensif memainkan peran penting dalam memastikan bahwa Turki membuat keputusan yang tepat dan strategis terkait kebijakan luar negerinya terkait krisis Suriah. Dengan melakukan evaluasi yang mendalam terhadap setiap alternatif kebijakan, Turki dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang implikasi, risiko, dan manfaat dari setiap pilihan yang tersedia. Hal ini memungkinkan Turki untuk mengadopsi kebijakan yang lebih terinformasi, berdasarkan

analisis yang matang dan pertimbangan yang menyeluruh terhadap situasi yang ada.

4. Keputusan untuk mengadopsi suatu kebijakan tertentu dipengaruhi oleh berbagai faktor yang kompleks dan beragam. Faktor-faktor tersebut meliputi karakteristik individu yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan, kerangka kelembagaan yang mengatur proses tersebut, pertimbangan ekonomi yang melibatkan kalkulasi biaya dan manfaat, serta strategi geopolitik yang mempertimbangkan posisi Turki dalam hubungan internasional. Dengan mempertimbangkan aspek-aspek ini secara holistik, Turki mampu memutuskan suatu hal dengan tingkat keakuratan tinggi ketika hendak menyelesaikan krisis Suriah serta memajukan kepentingan nasionalnya secara keseluruhan.

2.2 Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, salah satu rekomendasi bagi peneliti selanjutnya adalah menelaah isu penerimaan pengungsi Suriah di negara lain selain Turki. Penelitian ini bisa memberikan wawasan mengenai bagaimana kebijakan negara-negara tersebut dalam menanggapi krisis pengungsi dan dampaknya terhadap hubungan internasional mereka. Selain itu, peneliti dapat memperdalam pemahaman tentang bagaimana kebijakan luar negeri negara-negara tersebut beradaptasi terhadap krisis pengungsi dan implikasinya terhadap stabilitas regional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Allison, Graham. T. (1971). Essence of Decisions Explaining The Cuban Missile Crisis 1971. (Alfida F, Trans.). Canada : Little and Brown Company. Printed in USA

Creswell, J.W. 1994. *Research Design Qualitative And Quantitative Approaches.* London: Sage Publications.

Frankel, Joseph. 1988. *International Relations In A Changing World Fourth Edition*. New York: Oxford University Press.

Holsti, K.J. 1992. *Politik International: Suatu Kerangka Analisis*. Bandung: PT. Bina Cipta.

Jackson, Robert Dan George Sorensen. 2009. *Pengantar Studi Hubungan Internasional.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Kanti, Bajpai. 2000. *Human Security: Concept And Measurement.* New Delhi: Kroc. Institute Occasional Paper, Assosiate Professor. School For International.

Large, Judith Dan Timothy Sisk. 2006. *Democracy, Conflict And Human Security.* Swedia: International IDEA.

Mas'oed, Mohtar. 1994. *Ilmu Hubungan International: Disiplin Dan Metodologi*. Yogyakarta: PT.Pustaka LP3ES.

Nazir, M. 1988. *Metode Penelitian.* Jakarta:Ghalia Indonesia.

Plano, Jack C. Dan Roy Olton. 1999. *Kamus Hubungan Internasional*. Bandung: Abardin.

Rosenau, James N. Gavin Boyd, Kenneth W. Thompson. 1997. *World Politics: An Introduction*. New York: The Free Press.

Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial.* Bandung: Refika Aditama.

Tadjbakhsh, Shahrbanou Dan Anuradha M. Chenoy. 2007. *Human Security Concept And Implications*. New York: Routledge.

Taghian, Syarif. 2011. *Erdogan Muadzin Istanbul Turki Penakluk Sekularisme Turki*. Jakarta: Pustaka Al-Kausar.

Taspinar, Omer. 2008. *Turkey's Middle East Policies Between Neo-Ottomanism And Kemalism.* Carnegie PAPERS No 10, Carnegie Middle East Center.

UNDP. 1994. *Human Development Report 1994*. New York: Oxford University Press.

Sözen, A. (2010, Mei 10). A Paradigm Shift in Turkish Foreign Policy: Transition and
Challenges. Turkish Studies, XI(1), 116.

Mearsheimer, John (2001). The Tragedy of Great Power Politics. New York: W.W. Norton and Company. hlm. 162–163. ISBN 9780393076240.

Jurnal

Andi Ahmad Khairullah Zikri. (2021). Intervensi Militer Turki Terhadap Wilayah Kedaulatan Suriah Tahun 2016 – 2019. *Jom Fisip*, *8*(1), 1–14.

Anissa, A. (2021). Analisis Balance Of Interest Dalam Studi Kasus Kepentingan Turki Melakukan Kerja Sama Dengan Rusia Di Suriah Pada 2016 – 2019. *Nation State: Journal Of International Studies*, *4*(1), 18–34. Https://Doi.Org/10.24076/Nsjis.V4i1.423

Arthamevya Zherlindya Putri Darmawan, & Ratu Salmazahra Karmilawaty. (2023). Proposal Nuclear Naval Propulsion Dari Indonesia Untuk Pbb Sebagai Respons Atas Dinamika Keamanan Di Indo-Pasifik. *Bhuvana: Journal Of Global Studies*, *1*(1), 39–59. Https://Doi.Org/10.59408/Bjgs.V1i1.46

Islam, U. M., & Purnama, C. (2018). Kode Operasional Erdogan Berkaitan Dengan Kebijakan Luar Negeri Turki Terhadap Suriah. *Transborders: International Relations Journal*, *2*(2), 13–25. Https://Doi.Org/10.23969/Transborders.V2i1.968

Kamarullah, M. (2023). Dilema Pemerintah Indonesia Menolak Repatriasi WNI Eks ISIS: Antara HAM Atau Keamanan Nasional [The Dilemma Of Indonesian Government Rejecting The Repatriation Indonesian Ex-ISIS: Between Human Right Or National Security]. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, *14*(1), 53–74. Https://Doi.Org/10.22212/Jp.V14i1.3772

Luerdi, L., & Alfajri, A. (2018). Turkey's Foreign Policy Strategy Change In Syrian Crisis (2016-2017). *Jurnal Hubungan Internasional*, *7*(1), 48–59. Https://Doi.Org/10.18196/Hi.71124

Mudore, S. B., & Safitri, N. (2019). Dinamika Perang Suriah. *Politea : Jurnal Politik Islam*, *2*(2), 67–92. Https://Doi.Org/10.20414/Politea.V2i2.1437

Suhartini, R., & Meisha Calista, B. (2022). Mendalami Peran Dan Kepentingan Aktor-Aktor Dalam Konflik Di Suriah. *Jurnal Alternatif*, *2*(1), 36–49.

Syukran, & Ubaidullah. (2019). Dampak Kebijakan Pintu Terbuka (Open Door Policy) Turki Bagi Pengungsi Suriah Terhadap Kepentingan Nasional Turki Tahun 2011-2016 (Studi Kasus Pengungsi Suriah Di Turki). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, *4*(4), 1–24. Http://Www.Jim.Unsyiah.Ac.Id/FISIP/Article/View/12976/5569

Acharya, Amitav. 2001. *Human Security: East Versus West*. International Journal Vol. 56, No.3.

Altunisik, Benli Dan Ozlem Tur. 2006. From Distant Neighbour To Partners? Changing Syrian-Turkish Relation, *Sage Journals* Vol. 37. No. 2. Juni 2006. Https://Journals.Sagepub.Com/Doi/Abs/10.1177/0967010606066172

Putri, Amalia Zatalini Kusuma.. 2022. Kebijakan Turki Dalam Menampung Pengungsi Korban Perang Saudara Suriah Tahun 2011-2013, *Jurnal*. Semarang: Program Studi Hubungan Internasional Universitas Diponegoro, 2015. Https://Ejournal3.Undip.Ac.Id/Index.Php/Jihi/Article View/8268.

Sumaryati, Titik. 2016. Kebijakan Pemerintah Turki Terhadap Pengungsi Dari Suriah," *Jurnal*, Universitas Indonesia. Http://Lib.Ui.Ac.Id/File?File=Digital/2016-6/20424263-Mktitik20sumaryati.Pdf

Annamira, R. N., 2023. Erdogan 3 Periode Dan Dampaknya Terhadap Hubungan Turki-Suriah. Jurnal Hubungan Internasional. Universitas Pandjajaran.

Islam, U. M., & Purnama C., 2018. Jurnal Transborder : Kode Operasional Erdogan Berkaitan Dengan Kebijakan Luar Negeri Turki Terhadap Suriah. Vol 02. No 01.

Makalah

Buzan, Bary. 2000. Human Security; What It Means, And What It Entails, Makalah Dipresentasikan Pada *Asia Pasific Roundtable On Confidence Building And Conflict Resolution*. Kuala Lumpur, Juni 2000.

Skripsi

A'yuni, S. M. Q. (2019). *Analisa Open Door Policy Turki Terhadap Krisis Kemanusiaan Pengungsi Suriah Tahun 2011-2019*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Fernandes, Arya. 2008. Keberhasilan Adalet Ve Kalkinma Partisi : AKP Dalam Politik Turki" *Skripsi*. Jakarta: Jurusan Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2008) Http://Ejournal.Uin-Suka.Ac.Id/Syariah/Inright/Article/View/1277.

Ningsih, Restu Murdianti. 2011. Dinamika Identitas Nasional Dan Kebijakan Luar Negeri Turki Dibawah Kepemimpinan AKP. *Skripsi Sarjana FISIP Universitas Budi Luhur Jakarta*. Jakarta: Perpustakaan FISIP Uiversitas Budi Luhur.

Putra, Ismet. 2014. Pengaruh Konflik Domestik Suriah Terhadap Kebijakan Luar Negeri Turki Ke Suriah. 2011-2013. *Skripsi*. Jakarta: Program Studi Hubungan Internasional UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Https://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Bitstream/123456789/39050/3/Ismet%20Putr-FISIP.

Website

Herlambang, A. (2020). Mengurai Benang Kusut Konflik Di Suriah. Jurnal Transborders,1(2),82–93. Https://Www.Antaranews.Com/Berita/1919916/Mengurai-Benang-Kusut-Konflik-Armenia-Azerbaijan

Natalia, C. (2018). Ikhtisar: Global State Of Democracy: Mengkaji Ketahanan Demokrasi. In T. Anggraini & A. Lee (Eds.), *Ikhtisar: Global State Of Democracy: Mengkaji Ketahanan Demokrasi*. Kirana Karya. Https://Doi.Org/10.31752/Idea.2018.55

CNN Indonesia. 2022. Erdogan Ancam Banjiri Eropa Pengungsi Jika Kritik Soal Suriah. Https://Www.Cnnindonesia.Com/Internasional/20191011100135-120-438614/Erdogan-Ancam-Banjiri-Eropa-Pengungsi-Jika-Kritik-Soal-Suriah.

Dikarma, Kamran. 2022) Turki Rencanakan Operasi Militer Baru Di Suriah, Republika.Id., Https://Www.Republika.Co.Id/Berita/Rcd5nr335/Turki-Rencanakan-Operasi-Militer-Baru-Di-Suriah.

Ertugrul, Dogan. 2012. A Test For Turkey's Foreign Policy : The Syria Crisis, Yang Dimuat Dalam TESEV Foreign Policy Programme. 2012. " Jurnal. Istambul: The Turkish Economic And Social Studies Foundation. TESE. Https://Www.Files.Ethz.Ch/Isn/146703/Dogan%20Ertugrul_ENG.Pdf

Mostafa, M.G. 2018. Religion And The Israel-Palestinian Conflict: Cause, Consequence, And Cure. Washington Institute. Https://Www.Washingtoninstitute.Org/Policy-Analysis/Religion-And-Israel-Palestinian-Conflict-Cause-Consequence-And-Cure

Oktarianisa, Sefti. 2022. Erdogan Kembali Tegang Dengan Pemimpin Eropa, Ada Apa?. CNBC Indonesia. Https://Www.Cnbcindonesia.Com/News/20200309073951-4-143315/Erdogan-Kembali-Tegang-Dengan-Pemimpin -Eropa-Ada-Apa.

Pattiradjawane. 2022. Rennal. Kekuatan Kontinental Asia, Https://Nasional.Kompas.Com/Read/2011/04/06/03244867/Twitter.Com?Page=All.

Rahayu, Yogi Suryaningsih Abdi. 2022. Sejarah Perekonomian Era Turki Utsmani. Artikel. Http://Ei.Unida.Gontor.Ac.Id/Sejarah-Perekonomian-Era-Turki-Ustmani.

Taradewi, Dewa Ayu Tania, I Made Anom Wiranata, A.A. Ayu Intan Parameswari. 2022. Analisis Perubahan Kebijakan Luar Negeri Turki Terhadap Tiongkok Pada Masa Pemerintahan Adalet Ve Kalkinma Partisi. AKP) Tahun 2002-2013. Https://Ojs.Unud.Ac.Id/Index.Php/Hi/Article/Download/12800/8685

Erdogan: Pemimpin Turki Dan Suriah Akan Berkumpul. (2023, Januari 01). Diakses Pada 20 Februari 2024, Dari Berita Online Internasional

Https://Internasional.Republika.Co.Id/Berita/Ro1ycm349/Erdogan-Pemimpin-Turki-Dan-Suriah-Akan-Berkumpul

Aliyev, J., Pamuk D., Genturck A., Kazanci H., Sevencan A., (2021). Erdogan: Perdamaian Di Suriah Bergantung Pada Hubungan Turki-Rusia. Diakses Pada 21 Februari 2024, Dari Berita Internasional Turki. Https://Www.Aa.Com.Tr/Id/Dunia/Erdogan-Perdamaian-Di-Suriah-Bergantung-Pada-Hubungan-Turki-Rusia/2378594#

Erdogan, Recep Tayyip. (2015). "Turkish Grand National Assembly 25th Term 2ndlegislative Year Opening Speech"Https://Www.Tccb.Gov.Tr/En/Speeches-Statements/558/35495/Turkish-Grandnational-Assembly-25th-Term-2nd-Legislative-Year-Opening-Speech.Html.